

DISERTASI

**ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR) DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN dan
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Study Kasus PT. Vale Indonesia di Kab. Luwu Timur)**

Disusun dan diajukan oleh

**RUSLI RAZAK
E043181004**



**Promotor : Prof. Dr. Hj. Rabinah Yunus, M.Si
Co-Promotor : Drs. Hasbi, M.Si, Ph.D
Co-Promotor : Dr. Mansyur Radjab, M.Si**

**PROGRAM DOKTOR SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR) DALAM MEWUJUDKAN KEBERDAYAAN dan
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Study Kasus PT. Vale Indonesia di Kab. Luwu Timur)**

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Derajat Doktor

Program Studi Sosiologi

Disusun dan Diajukan oleh

RUSLI RAZAK

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**ANALISIS IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (CSR) DALAM MEWUJUDKAN
KEBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Studi Kasus PT Vale Indonesia Di Kab. Luwu Timur)**

Disusun dan diajukan oleh

RUSLI RAZAK

E043181004

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 25 Maret 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,



Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M.Si.
Nip. 196011231986032001

Co. Promotor,



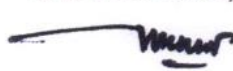
Drs. M. Hasbi, M.Si., Ph.D
NIP. 196308271991031003

Ketua Program Studi
Sosiologi,



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU.
NIP. 194809131978031001

Co. Promotor,



Dr. Mansyur Radiab, M.Si.
NIP. 195807291984031003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Amin, M.Si.
NIP. 196511091991031008



PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Rusli Razak, AP., M.Si
Nomor Pokok : E043181004
Program Studi : Program S3 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik
Universitas Hasanuddin Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul:

**Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
dalam Mewujudkan Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus Pada PT. Vale Indonesia di Kab. Luwu Timur)**

Benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Adapun ketika saya mengutip tulisan dari orang lain, sumbernya telah dimasukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Februari 2022

Yang menyatakan



Drs. Rusli Razak, AP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang atas sifat Rahman dan Rahim-NYA penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang berjudul “Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam mewujudkan Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur)”.

Penulis bersyukur dan berterima kasih kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

Dalam proses penyelesaian disertasi ini penulis banyak mendapat bantuan moril dan materil, dukungan pemikiran dari berbagai pihak. Tanpa kebaikan dan ketulusan hati mereka, disertasi ini tidak akan mungkin dapat penulis selesaikan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, yang juga sebagai Dosen Pengampu mata kuliah selama penulis mengikuti proses pembelajaran di almamater tercinta atas arahan dan motivasinya.
2. Tim Promotor yang terdiri dari Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si., Drs. Hasbi, M.Si.,Ph.D., dan Dr. Mansyur Radjab, M.Si, yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, ilmu dan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan penuh ketulusan hati, kesabaran, dan ketekunan demi penyelesaian disertasi ini.
3. Dewan Penguji yang terdiri dari Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., Dr. Rahmat Muhammad, M.Si., dan Dr. Suparman Abdullah, M.Si., serta Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S.Sos, M.Si yang telah memberikan bimbingan, pemahaman, pengalaman dan dorongan moril dengan penuh pengertian.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial daan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H.Armin Arsyad, M.Si dan para Pimpinan FISIP atas dorongan dan dukungannya.

5. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Prof., Jamaluddin Jompa, Ph. D. dan stafnya atas pelayanan yang telah diberikan.
6. Ketua Departemen Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin , Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D. atas bimbingan dan motivasinya selama mengikuti proses perkuliahan dan penyusunan disertasi.
7. Ketua Program Studi S3 Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU., atas semua arahan dan bimbingan, baik selama perkuliahan maupun selama proses penyelesaian disertasi.
8. Seluruh Dosen Program Studi S3 Sosiologi FISIP Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
9. Para Pejabat PT Vale Indonesia, Para Konsultan COMMIT Foundation, ALIKSA dan KNK beserta seluruh Tenaga Pendampingnya juga tidak lupa kepada para warga masyarakat penerima manfaat program CSR Vale yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S3 Sosiologi dan teman sejawat Dosen IPDN Kampus Sulawesi Selatan yang selalu memberi perhatian dan semangat kepada penulis untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, terutama isteri Dra. Eet Ratini dan anak-anak ,penulis yang dengan kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu mendampingi penulis dalam penyusunan disertasi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, dukungan, dorongan dan perhatian yang telah Bapak, Ibu dan teman sejawat berikan bernilai ibadah yang berlipat ganda pahala dan diberi balasan oleh Allah SwT dengan surge firdaus. Aamiin ya Raobbal Aalamiin.

Makassar, Maret 2022

Penulis,

Rusli Razak

ABSTRAK

Rusli Razak : Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Mewujudkan Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat. (Study Kasus PT. Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur).

(Dibimbing oleh Hj. Rabinah Yunus, Hasbi, dan Mansyur Radjab).

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis (1) Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Vale Indonesia, dan (2) Faktor-Faktor yang memengaruhi Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat, dan (3) Model Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat pada kawasan PT Vale Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara, observasi, telaah dokumen dan Focus Group Discussion (FGD) data dianalisis menggunakan teknik analisis data interaktif model Miles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Vale Indonesia dilakukan melalui Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dengan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri (PKPM) pada 10 kawasan. *Strategi Partneship* (SP) dalam bentuk Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dan *Social Contribution* (SC) dalam bentuk pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM).(2) Implementasi Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT Vale sudah berkembang dan lebih maju dibanding lima tahun sebelumnya,yang hanya bersifat Charity dan philanthropis. Sekarang sudah bersifat pemberdayaan dan pengembangan yang menitik beratkan pada bidang Ekonomi, pendidikan dan kesehatan; (3) Model Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Vale Indonesia memadukan dua model pelaksanaan CSR. Pertama; dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan,CSR dalam hal ini PT Vale melaksanakan sendiri dan Kedua; melalui lembaga atau yayasan dalam hal ini bermitra dengan lembaga atau yayasan COMMIT, ALIKSA dan Karya Nusantara Konsultan (KNK). melalui penandatanganan Kerja sama.

Kata Kunci : Implementasi, CSR, Keberdayaan, Kesejahteran masyarakat

ABSTRACT

Rusli Razak : Analysis of the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in Realizing Community Empowerment and Welfare. (Case Study PT. Vale Indonesia in East Luwu Regency).

(Supervised by Hj. Rabinah Yunus, Hasbi, and Mansyur Radjab).

This study aims to describe and analyze (1) the implementation of PT Vale Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) and (2) the factors that influence Community Empowerment and Welfare, and (3) the Model of Community Empowerment and Welfare in the PT Vale Indonesia area.

This type of research is qualitative research using a case study approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, document reviews and Focus Group Discussions (FGD) with data analysis using the Miles and Huberman interactive data analysis technique.

The results showed that: (1) PT Vale Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) implementation was carried out through Community Empowerment Development (PPM) with the Independent Rural Area Development Program (PKPM) in 10 areas. Partnership Strategy (SP) in the form of Sustainable Environmental Friendly Healthy Agriculture Program (PSRLB) and Social Contribution (SC) in the form of Small and Medium Enterprises (UKM) development. (2) Implementation of PT Vale's Corporate Social Responsibility (CSR) has developed and is more advanced compared to the previous five years, which were only Charity and philanthropic. Now it is empowering and developing which focuses on the fields of Economy, education and health; (3) PT Vale Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Implementation Model combines two CSR implementation models. First; by being directly involved in activities, CSR in this case PT Vale implements itself and Second; through institutions or foundations in this case partnering with institutions or foundations COMMIT, ALIKSA and Karya Nusantara Consultants. through the signing of the Cooperation.

Keywords: Implementation, CSR, Empowerment, Community Welfare

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 21 |
| C. Tujuan Penelitian | 22 |
| D. Manfaat Penelitian | 22 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 23 |
| A. Tinjauan Konsep dan Teori | 23 |
| A.1 Implementasi | 23 |
| A.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)..... | 40 |
| B. Teori-Teori Sosiologi yang Relevan | 63 |
| B.1 Teori Pertukaran Sosial | 65 |
| B.2 Teori Struktural Fungsional..... | 67 |
| B.3 Konsep dan Teori Pemberdayaan | 71 |
| B.4. Teori Kesejahteraan..... | 94 |

| | |
|--|------------|
| C. Hasil – Hasil Penelitian Terdahulu | 103 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 121 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 122 |
| A. Jenis Penelitian..... | 122 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 124 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 124 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 124 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 133 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | 136 |
| A. Profil Kabupaten Luwu Timur | 136 |
| B. Profil PT. Vale | 141 |
| BAB V IMPLEMENTASI CSR PT VALE INDONESIA | 165 |
| A. Pelaksanaan CSR PT. Vale | 165 |
| B. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan | 188 |
| C. Proses Pelaksanaan PKM..... | 192 |
| D. Program Kegiatan..... | 200 |
| E. Isu Strategis | 199 |
| F. Respon Terhadap Isu..... | 218 |
| G. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian | 220 |
| BAB VI KEBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 235 |
| A. Program Kawasan PT Vale Indonesia..... | 235 |
| B. Keberdayaan Dan Kesejahteraan | 253 |
| BAB VII. MODEL CSR PT VALE INDONESIA | 259 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| BAB VIII PENUTUP..... | 270 |
| 8.1 Kesimpulan | 271 |
| 8.2 Saran/Rekomendasi | 251 |
| 8.3 Novelty | 273 |
| DAFTAR PUSTAKA | 274 |
| LAMPIRAN | 279 |
| CURICULUM VITAE..... | 286 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba (Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Perusahaan merupakan salah satu sumber dan sarana yang efektif dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional merupakan proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kualitas manusia. Secara sosiologis, negara dipandang bagai satu sistem, perusahaan menjadi salah satu dari sub-sub sistem dari negara. Sub-sub sistem ini bekerja dan saling berkaitan satu sama lain untuk mendukung agar sistem dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan sistem (Parsons, 1975). Karena itu, dunia usaha memegang peranan penting dalam pembangunan untuk menggerakkan roda perekonomian (Kamdani, 2013). Selain itu, perusahaan memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi, sebagai berikut :

- a) Menghasilkan barang dan jasa. Adanya kebutuhan yang harus dipenuhi mendorong perusahaan menciptakan barang dan jasa pemuas kebutuhan yang diperlukan oleh setiap rumah-tangga, pemerintah, perusahaan lain, maupun masyarakat luar negeri melalui kegiatan ekspor dan impor.

- b) Sebagai pengguna faktor produksi, semua faktor produksi yang telah disediakan, perusahaan akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga. Balas jasa tersebut berupa upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba. Pembelian faktor produksi ini kadang juga melibatkan masyarakat luar negeri, baik berupa tenaga ahli, pinjaman modal, barang-barang modal, maupun bahan baku.
- c) Membayar pajak kepada pemerintah. Perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat umum. Dengan demikian, perusahaan ikut memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu pula, perusahaan harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai bukti partisipasinya terhadap pembangunan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), Pasal 1 angka 3, dinyatakan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.(Putu Edgar Tanaya 2016 : 269). Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan secara berkesinambungan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Corporate Social Responsibility telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR pada dasarnya adalah komitmen perusahaan terhadap tiga (3) elemen yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. (Ahmad Nurkhin 2018 : 24)

Definisi CSR berasal dari konsep dan pemikiran yang dicetuskan oleh John Elkington dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1997 yang berjudul "*Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*", dimana dalam buku tersebut Elkington mengemukakan konsep "3P" (*profit, people, dan planet*) yang menerangkan bahwa dalam menjalankan operasional perusahaan, selain mengejar profit/keuntungan ekonomis sebuah korporasi harus dapat memberikan kontribusi positif bagi *people* (masyarakat) dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Wibisono, 2007 dalam Apri Kuntariningsih 2014:8; Ahmad Suhaimi 2016:234-235)).

CSR berguna bagi perusahaan dan masyarakat karena telah terbukti bahwa CSR dapat memberikan manfaat kepada masyarakat (Soesilowati et al, 2011) dan dapat membantu dalam megentaskan kemiskinan (Prayogo dan Hilarus, 2012). Hal yang penting untuk dicatat adalah bahwa adanya CSR telah mendorong masyarakat setempat untuk lebih berperilaku berusaha untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi (Sumaryo, 2011, dalam Apri Kuntariningsih 2014:9)

Kalau kita menggali lebih jauh, pelaksanaan CSR merupakan bentuk implementasi dari praktek bisnis yang *sustainable*. Melakukan program CSR yang

berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Menurut Lesmana (2006), program CSR baru dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit memenuhi tiga bentuk yaitu :

a. Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Sebagaimana dalam Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: S.106/M.PM.P.BUMN/2000 Tanggal 17 April 2000 yang didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, entitas bisnis, dan pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.

Implementasi pengembangan masyarakat (*Community Development*) merupakan kegiatan yang diarahkan secara terencana dan sistemik untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas yang lebih baik.

b. Berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan

Menurut *World Commission on Environment and Development* (WCED), pembangunan berkelanjutan mengandung arti pembangunan berwawasan

jangka panjang, meliputi antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat, sehingga dapat mendukung kehidupannya.

c. Menjaga hubungan dengan masyarakat.

Upaya membina hubungan dilakukan pada seluruh fase dari kegiatan proyek. Tujuannya selain untuk membina hubungan baik adalah untuk menampung keluhan dan konsern penduduk lokal sehingga dampak negative dapat dikurangi.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada empat prinsip yang harus dipenuhi :

1. Pemenuhan kebutuhan manusia (*Fulfillment of Human Needs*).
2. Memelihara integritas ekologi (*Maintenance of Ecological Integrity*)
3. Keadilan Sosial (*Social Equity*)
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri (*Self Determination*).

Paradigma pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar utama, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Keberlanjutan yang bersumber dari dua gagasan penting yaitu :

1. Gagasan Kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia, yang harus diberi prioritas utama.

2. Gagasan Keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial masyarakat terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan.

Kebijakan pembangunan adalah diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Masalah utama yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan kemiskinan. Masalah-masalah ini saling terkait dan tidak dapat dipecahkan secara terpisah.(A.Suhaimi 2016:228-229).

Menurut Yacoob dan kawan-kawan (1987) dalam Hadi (2003) Pembangunan berkelanjutan harus memenuhi minimal empat komponen sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar :
 - a. Kebutuhan materi
 - b. Kebutuhan non materi
2. Pemeliharaan lingkungan :
 - a. Konservasi
 - b. Mengurangi konsumsi
3. Keadilan social :
 - a. Keadilan masa depan
 - b. Keadilan masa kini.
4. Kesempatan menentukan nasib sendiri :
 - a. Masyarakat mandiri
 - b. Partisipatori demokrasi.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut akan bisa terwujud jika didukung oleh pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good governance* dikategorikan baik jika sumber-sumber daya dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif, efisien yang merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat. *Good Governane* sebagaimana dirumuskan oleh ICEL (1999) mempersyaratkan lima hal :

1. Lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi control dan penyalur aspirasi masyarakat (*Efekctive Representatitve System*).
2. Pengadilan yang mandiri, bersih dan professional (*Yudicial independence*)
3. Birokrasi yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat dan memiliki integritas (*Reliable and Responsive Bueraucracy*).
4. Masyarakat sipil yang mampu melaksanakan fungsi kontrol (*Strong and participatory Sivil Society*).
5. Desentralisasi dan lembaga perwakilan yang kuat (*Democratic decentralization*). (Husaimi 2016 : 232-233)

Komitmen pemerintah untuk membangun dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip Transparan, Akuntabilitas, Efisiensi, Efektivitas, dan partisipasi, telah dimulai sejak tahun 1999 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini telah beberapa kali direvisi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kelahiran Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, menandai bergeser dan berubahnya Paradigma pemerintahan dari pemerintahan yang bersifat sentralistik

ke pemerintahan yang desentralistik. Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tata kelola pemerintahan yang baik, yang demokratis, yakni dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintah bisa mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, pemerintah melaksanakan Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional mengharapkan tidak ada seorangpun yang tertinggal dan tidak terjangkau oleh kegiatan pembangunan. Menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya, baik biaya, tenaga dan ketrampilan, maka digunakan strategi Sinergitas yang dikenal dengan tiga pilar, yakni Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat. Pembangunan nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan dunia usaha saja, tetapi seluruh masyarakat mempunyai peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi keuangan, sosial, dan aspek lingkungan (*Triple bottom line*). Dari tiga pilar tersebut, Dunia usaha merupakan pilar yang diyakini bisa mempunyai andil dan kontribusi besar dalam menyukseskan pembangunan nasional. Perusahaan bagi pemerintah mempunyai arti yang sangat penting, karena perusahaan betapapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak awal tahun 1970, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan kebutuhan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. CSR tidak hanya merupakan kegiatan kreatif perusahaan dan tidak terbatas hanya pada pemenuhan aturan hukum semata (Siregar, 2007). Di tahun 1970 topik CSR mengemuka melalui tulisan Milton Fridmen tentang bentuk tunggal tanggung jawab sosial dari kegiatan bisnis. Bahkan, Estes (2005) menilai roh atau semangatnya telah ada sejak mulai berdirinya perusahaan-perusahaan di Inggris yang tugas utamanya adalah untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial telah melakukan pemetaan tanggung jawab sosial dunia usaha membentuk Forum CSR Kesejahteraan Sosial Nasional dan memberikan Padma Mitra Awards penghargaan tertinggi terhadap perusahaan Badan Usaha yang telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan berkomitmen terhadap pembangunan kesejahteraan sosial dan pengembangan masyarakat setempat dengan kekhasannya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 point 3, menyebutkan Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam mewujudkan peran aktif perusahaan dalam pembangunan nasional dalam segala bidang

umumnya baik secara mikro dan makro, serta pembangunan bidang ekonomi khususnya.

Pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia setiap tahunnya menunjukkan tren yang positif, baik dari kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, penyaluran CSR dari sebuah perusahaan cukup variatif, tak hanya berkisar pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat, namun juga mulai memberikan porsi pada pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan, tanggungjawab filantropis yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, misal memberikan beasiswa, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat umum, mendirikan fasilitas sosial, dan sebagainya. (Joko Rizkie Widokarti).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi. Jenis Perusahaan bisa diklasifikasikan menurut lapangan usahanya, kepemilikannya, dan bentuknya. Dari segi lapangan usahanya perusahaan terdiri atas: Perusahaan Ekstraktif, Perusahaan Agraris, Perusahaan Industry. Perusahaan Perdagangan dan

Perusahaan Jasa. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam. Perusahaan agraris adalah perusahaan yang bekerja dengan cara mengolah lahan/ladang. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa.

Perusahaan-perusahaan tersebut memberikan peran sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam perekonomian Indonesia adalah seperti berikut :

- a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
- b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
- c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
- d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
- e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
- f. Meningkatkan sumber pendapatan Negara melalui pajak.
- g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa. (Mardikanto 2018:7-8)

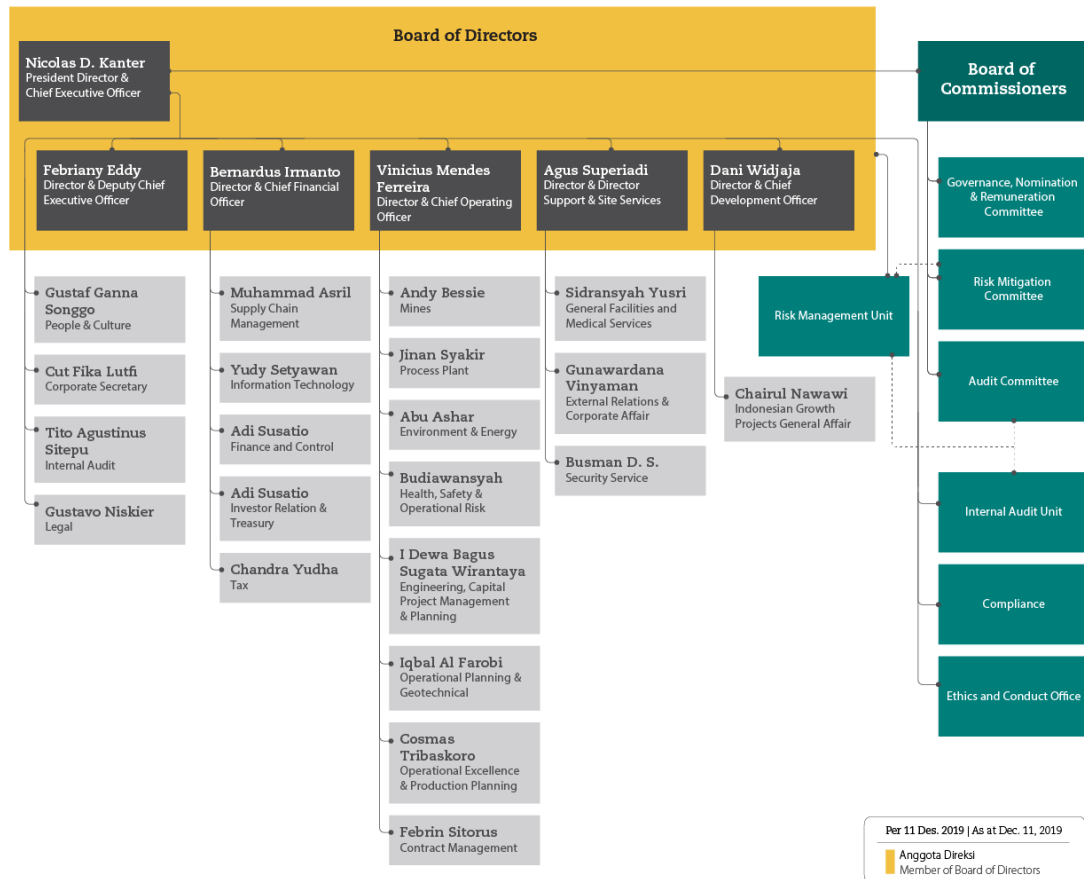
Sejak tahun 2007, CSR yang disebut sebagai tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan sebagai kewajiban perusahaan. Mulai saat itu, CSR menjadi “keharusan” dan dianggap sebagai hak masyarakat. Tuntutan ini bagai pisau bermata dua; perusahaan dapat memanfaatkan CSR dan sekaligus menjadi beban tambahan karena pengucuran dana CSR dianggap keharusan.

Lima tahun setelahnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 menambah daftar regulasi CSR yang ada di Indonesia, selain perda-perda CSR yang diterbitkan oleh berbagai daerah, pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Meski isi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 secara substansi tidak “menggigit” dan memberi keleluasaan kepada perusahaan, tekanan terhadap perusahaan untuk memberikan dana CSR atau melakukan program CSR pada kenyataannya terus menguat.

Upaya memperkuat legalitas CSR di Indonesia terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2016, DPR dan DPD-RI telah menyusun Rancangan Undang-Undang CSR yang berbeda. Upaya ini didukung Kementerian Sosial yang terlibat bersama Komisi III DPR menyusun RUU CSR, dengan harapan perusahaan dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan. Di sisi lain, DPD-RI sempat mengadakan studi banding ke beberapa negara untuk mempelajari regulasi CSR.

PT Vale Indonesia Tbk merupakan anak perusahaan dari Vale, sebuah perusahaan pertambangan global yang berkantor pusat di Brasil. Sebelumnya bernama PT International Nickel Indonesia Tbk. (PT Inco), mengoperasikan tambang nikel *open pit* dan pabrik pengolahan di Sorowako, Sulawesi Selatan, sejak tahun 1968. Saat ini telah menjadi produsen nikel terbesar di Indonesia dan menyumbang 5% pasokan nikel dunia. PT. Vale Indonesia mempekerjakan sekitar 3.300 karyawan dan lebih dari 3000 personil kontraktor. Adapun struktur Organisasi dan Pejabat Senior pada PT. Vale Indonesia sebagai berikut:

Struktur organisasi dan pejabat senior PT Vale Indonesia Tbk
PT Vale Indonesia Tbk organization structure and senior executives



PT International Nickel Indonesia terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Mei 1990 dengan ticker INCO.IJ, berganti nama menjadi PT. Vale Indonesia Tbk sejak akhir 2011. PT. Vale Indonesia beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (CoW) dengan Pemerintah Indonesia.

PT. Vale Indonesia merupakan salah satu perusahaan Ekstraktif, yang bergerak dalam bidang pengendalian kekayaan alam. Visinya Menjadi perusahaan sumber daya alam nomor satu di Indonesia yang menggunakan

standar global dalam menciptakan nilai jangka panjang, melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam.

Untuk mencapai visi tersebut, PT Vale Indonesia mempunyai misi Mengubah sumber daya alam menjadi sumber kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam operasional PT Vale Indonesia adalah Kehidupan merupakan hal yang Terpenting, Keselamatan jiwa lebih penting daripada keuntungan semata; Menghargai Karyawan, Membimbing dan membuka peluang bagi perkembangan individu, memberikan penghargaan kepada seseorang tanpa memandang latar belakang mereka, mendukung keberagaman; mengakui aspirasi serta kebutuhan individu. Menjaga Kelestarian Bumi, Komitmen terhadap perkembangan masyarakat, lingkungan dan ekonomi dalam berbagai keputusan bisnis. Melakukan Hal Yang Benar, Mendukung kepercayaan yang didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan jelas, bertindak adil, penuh integritas, dan tunduk pada peraturan hukum. Bersama-Sama Menjadi Lebih Baik, Berjuang untuk terjadinya kerjasama, peningkatan dan inovasi yang terus menerus, penegakan disiplin kerja untuk meningkatkan nilai-nilai jangka panjang; Mewujudkan Tujuan, Suka tantangan, kemampuan beradaptasi, bangga atas prestasi dan apa yang telah dilakukan dalam membentuk dunia. (Website PT Vale Indonesia).

PT Vale Indonesia mematuhi dan menjalankan pedoman serta prinsip pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Vale Global. Prinsip Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang dijadikan misi PT Vale Indonesia adalah untuk mengolah sumber mineral untuk kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Bagi PT Vale Indonesia, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai bila aktivitas, terutama

dalam operasi pengelolaan tambang, dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan semua pemangku kepentingan, berkontribusi kepada penguatan sosial, pembangunan kompetensi ekonomi lokal dan konservasi lingkungan dan pelestarian, melalui pendekatan manajemen yang sadar dan bertanggung jawab, tindakan perusahaan secara sukarela dan penguatan kerjasama dengan pemerintah, institusi publik, sektor swasta dan masyarakat luas.

Sejak tahun 1968, PT INCO Tbk (yang dilanjutkan oleh PT Vale Indonesia) telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya nikel secara berkelanjutan di wilayah Kontrak Karyanya untuk memberikan manfaat yang optimal bagi para pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, pemerintah dan masyarakat.

PT Vale Indonesia juga melanjutkan program perubahan paradigma (*change in paradigm*) dalam melaksanakan program sosial lima tahun pertama, dengan melakukan kemitraan tiga sektor, yaitu Perusahaan, pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat dalam bentuk program PTPM, yang juga terus menyebarkan Sistem Intensifikasi Beras atau *System of Rice Intensification* (bagian dari jalan menuju pertanian berkelanjutan) ke banyak daerah di Luwu Timur. (Profil PT Vale Indonesia)

PT Vale Indonesia mempekerjakan lebih dari 3000 karyawan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Setiap karyawan mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan pemetaan kebutuhan yang jelas serta struktur organisasi yang efektif. PT. Vale Indonesia sangat mengandalkan kepada sumber daya manusia yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut,

Perusahaan sangat menekankan pentingnya strategi kepemimpinan dan sumber daya manusia. Strategi kepemimpinan dilaksanakan untuk melanjutkan komitmen Perusahaan terhadap pengembangan kepemimpinan lokal. Saat ini, tiga dari empat anggota Direksi Perseroan berkebangsaan Indonesia.

Tanggal 22 Oktober 2019 , PT Vale Indonesia meraih peringkat 3 dari 10 perusahaan dalam ajang *Indonesia Green Company Award* (IGCA) 2019 yang diselenggarakan oleh majalah SWA, di Hotel Shangrila Jakarta. Ketua dewan juri IGCA, Emil Salim mengatakan, kesepuluh perusahaan dinilai telah melakukan *beyond the call of business* sehingga menjadi *green company*. PT Vale Indonesia dinilai dewan juri telah membangun dan tumbuh di tengah situasi yang sulit, yakni mudahnya pecah konflik local, namun perusahaan konsisten merangkul masyarakat, setapak demi setapak.

.Penggunaan energi terbarukan tidak hanya diperuntukkan bagi perusahaan semata, melainkan juga dinikmati oleh masyarakat. Senior Manager of Tax PT Vale Indonesia Chandra Yudha mengatakan penghargaan itu menjadi tantangan PT Vale Indonesia agar ke depan lebih baik lagi.

“Lebih daripada itu, prestasi ini berkat komitmen bersama, di semua lini dari atasan hingga bawahan,” kata Chandra yang mewakili perusahaan menerima penghargaan tersebut.

Chief Editor SWA Kemal Gani mengatakan, IGCA yang sudah berlangsung sejak 2012 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang dinilai berkomitmen menjalankan *triple bottom line*.

"Selain menguntungkan secara bisnis, perusahaan berkomitmen membangun prinsip *sustainability* dan kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik," kata dia.

Penilaian IGCA mengacu pada Boston Consulting Group tentang *green company*, yakni *principle, process, product & promotion*.

Ada empat lini yang dinilai, yakni komitmen (compliance, konsep, strategi, visi), langkah pelaksanaan, program keberlanjutan, dan hasil kongkret.

Dewan Juri merupakan pakar kompeten serta kredibel di bidang lingkungan, yaitu Prof Emil Salim dari Universitas Indonesia, Masnellyarti Hilman (pemerhati lingkungan hidup), Mas Achmad Daniri (Anggota Pengawas KEHATI), Prof Eniya Listiani Dewi (Deputy Chairperson for IT, Energy and Material BPPT), dan Darwina Wijayanti (Sustainability & Capacity Building DW Consultant).

Sepuluh perusahaan yang terpilih telah melalui seleksi Indeks SRI KEHATI, penjurian melalui sidang redaksi, presentasi finalis di depan panel juri, serta pleno dewan juri yang kemudian menetapkan 10 finalis dengan skor rata-rata minimal 70.

"Mereka berhak menyandang predikat Indonesia Green Company 2019," pungkasnya.

Tahun sebelumnya, PT Vale Indonesia juga meraih predikat IGCA 2018 dan Green Concern 2017.

"Penghargaan ini menambah deretan prestasi PT Vale Indonesia, dimana pada Juli lalu, PT Vale Indonesia meraih Penghargaan Subroto di bidang Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara," terang Senior Manager Communications PT Vale Indonesia, Bayu Aji.

(tribun-timur.com @Fahrizal_syam)

Urgensi dan pentingnya CSR bisa dilihat dari beberapa hal dibawah ini :

1. Aktifitas perusahaan sendiri menentukan keberlangsungan dari dunia usaha, yaitu dunia usaha tidak akan bisa berkembang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sosial dimana perusahaan berada, sehingga adanya tanggung-jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) sangat penting bagi kelangsungan bisnis sebuah perusahaan yang telah mengeksplorasi dan mengeksploitasi baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.
2. CSR bukan suatu kewajiban yang dibebankan oleh Negara kepada perusahaan, namun sebagai komitmen dari perusahaan itu sendiri kepada lingkungannya (kepedulian). CSR sangat penting karena sebagai pertanggungjawaban moral, etik, dan sosial dari sebuah perusahaan yang telah mereguk keuntungan dari bisnisnya.
3. CSR menurut *Global Reporting Iniatif* (GRI) memberi dampak pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dampak ekonomi dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat atau para pemangku kepentingan dan prospek pembangunan dalam jangka panjang. Dampak sosial, GRI membagi dalam empat kategori, yakni Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), Tenaga Kerja (*Labour*), masyarakat (*Society*), serta tanggung jawab produk (*product Responsibility*). Dampak Lingkungan GRI menjabarkan dalam tiga struktur dampak, yaitu dampak yang diakibatkan oleh pemakaian input produksi,

dampak yang diakibatkan oleh output produksi, serta modus dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan.(Dwi Kartini 2013 : 27-33).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan agar dapat dikenal oleh masyarakat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis, meningkatkan citra perusahaan, dan *output* yang paling penting ialah meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Mulyadi *et al.* 2012). Ambadar (2008) mendefinisikan “CSR sebagai fungsi yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan sosial perusahaan, sehingga perkembangan masyarakat akan seiring dengan perkembangan perusahaan”. Lebih lanjut, CSR merupakan suatu kegiatan yang dirancang perusahaan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembinaan serta dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Irawan 2013; Ariefianto 2015).

Penelitian dan pengkajian mengenai CSR dari berbagai aspek dan berbagai topik sudah banyak dilakukan. Khusus penelitian yang menjadikan PT Vale Indonesia sebagai lokus, dapat kami kemukakan antara lain berikut ini.

Sawedi, dkk dalam penelitiannya berjudul :” Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) menyimpulkan antara lain Evolusi pelaksanaan CSR PTVI perlahan merangkak dari tahapan mencapai target ekonomi (profit) kemudian patuh dan taat terhadap kewajiban-kewajiban hukum (*compliance*) dan terus bergerak melampaui aspek-aspek etika dalam berbisnis. Pada akhirnya, CSR

PTVI mencapai tahapan filantropis-transformatif yang menurut Carroll (1991) dan juga Visser (2010) merupakan tahapan tertinggi dari implementasi CSR yang berkelanjutan. Model CSR seperti ini juga sejalan dengan konsepsi integratif dari Preston dan Post (1975) dimana perusahaan secara serius mengintegrasikan tuntutan sosial masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang dilakukannya. Dengan demikian maka terciptalah pola interaksi dan komunikasi yang saling memahami dalam kerangka fungsional berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsons (1961). PTVI berhasil beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya melalui integrasi sosial-kultural dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan.

Putu Edgar Tanaya dalam penelitiannya yang dimuat di jurnal Komunikasi Hukum Dengan judul :” Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Etika Bisnis Dan Etika Sosial Di Indonesia, menulis konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT), Dalam UUPT Pasal 1 angka 3, dinyatakan: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Rismawati dalam hasil penelitiannya mengemukakan : Program *Corporate Social Responsibility*: Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis

Kearifan Lokal. Penelitian ini bertujuan menjabarkan bagaimana nilai perusahaan PT Vale Indonesia yaitu “*no bussiness interruption*” dan nilai budaya lokal yaitu budaya *siri*’ dan *maseddisiri*’ membentuk konsep pertanggungjawaban sosial. Melalui studi kasus, peneliti ingin mengeksplorasi peran kedua budaya ini dalam membentuk realitasnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *no bussiness interruption* dimaknai sebagai perintah menjaga lingkungan dan keamanan serta keselamatan kerja karyawan agar aktivitas produksi tidak terhalang. Di sisi lain, nilai-nilai budaya Luwu telah mengajarkan satu ikatan yang sangat kokoh berdasarkan rasa malu (*siri*’).

Namun penelitian tentang Implementasi CSR mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan sosial masih langka. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat sebagai judul penelitian dengan pokok permasalahan: ”Analisis implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Vale Indonesia dalam mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada masyarakat yang dilakukan PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur?

2. Bagaimana Keberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat pada sepuluh kawasan perusahaan setelah Implementasi Tanggung jawab sosial perusahaan PT Vale Indonesia?.
3. Bagaimana Model Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT Vale Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan PT Vale Indonesia pada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur..
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di sepuluh kawasan setelah PT Vale Indonesia mengimplementasikan Tanggung jawab sosialnya.
3. Untuk menganalisis model Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan PT Vale Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis; Memperkaya khasanah pustaka dan ilmu pengetahuan bagi akademisi dan mahasiswa yang berminat meneliti mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam mewujudkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Manfaat Pragmatis; Sebagai bahan masukan (sumbangan pemikiran) bagi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam meningkatkan partisipasi/kontribusi perusahaan sebagai wujud kepedulian dan tanggung

jawab sosialnya dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus menjadi saran/rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya mengakselerasi perwujudan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Konsep dan Teori

Sesuai judul penelitian penulis, ada beberapa konsep yang perlu diuraikan terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman. Beberapa konsep/teori tersebut adalah Implementasi, CSR, Pemberdayaan, Kesejahteraan, Teori Struktural Fungsional dan Pertukaran Sosial sebagai Grand Teori dan Teori Robert K. Merton dan Peter Blau sebagai Middle range theory. Konsep dan teori-teori tersebut penulis uraikan di bawah ini.

A. 1. Implementasi

Terdapat banyak ahli yang memberikan sumbangan dan pemikirannya terkait dengan Implementasi Kebijakan, sejalan dengan berlakunya konsep dari implementasi yang dibicarakan. Penulis mengutip beberapa teorinya.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto (2012:20) implementasi dimaknai dengan beberapa kunci sebagai berikut:

- a. *To Carry Out*, untuk menjalankan kebijakan.
- b. *To Fulfill*, memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan.
- c. *To produce*, untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan.
- d. *To Complete*, untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Sehingga dalam proses menentukan suatu kebijakan, implementasi berperan sebagai suatu bentuk perwujudan utama yang terdiri atas tahapan perumusan sampai dengan tahap pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam hal ini, sebagai bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang ada tidak akan jauh dari unsur-unsur politik yang terkandung didalamnya serta berorientasi pada kepentingan yang dimiliki. Berdasarkan pendapat Syauckani dalam Wahab (2004:25) menyatakan bahwa “Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan”. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup yang pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengantarkan kebijaksanaan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi menurut Lester dan Steward dalam Winarno (2012:146) menyatakan bahwa “Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan program”.

Berdasarkan penjelasan diatas, implementasi adalah pelaksanaan aturan-aturan oleh organisasi dan perangkat secara bersama dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Van Meter dan van Horn dalam Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Beberapa Teori Implementasi Kebijakan penulis sajikan di bawah ini:

1. Teori Implementasi George C. Edward III

Dalam membahas Implementasi Kebijakan, Edwards mulai dengan mengajukan dua pertanyaan yakni: Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil? Dan Hambatan-hambatan apa yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan gagal?. Edwards berusaha menjawab dua pertanyaan penting ini dengan membicarakan empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sumber-sumber, kecenderngan² atau tingkah laku² dan struktur birokrasi (Budi Winarno 2012:177).

1 .Komunikasi

Menurut Edwards, secara umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi merupakan factor pertama yang berpengaruh pada komunikasi kebijakan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama; pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Kedua; Informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Ketiga; penangkapan komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan..Kejelasan merupakan factor penting kedua dalam komunikasi. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya penafsiran yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna awal dari pesan yang disampaikan.Konsistensi merupakan factor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.(Budi Winanrno 2012:178-180).

2. Sumber-Sumber

Sumber-sumber kebijakan merupakan factor yang penting bagi implementasi kebijakan. Tanpa sumber-sumber, kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak pernah di ada realisasinya. Sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan yang memadai. dengan jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. adalah staf. Tentu saja staf disini bukan hanya dalam arti kuantitas atau jumlahnya memadai, tetapi juga adala kualitas dalam arti staf memiliki keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, Informasi merupakan sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan kebijakan. Kedua, bentuk kedua informasi adalah data tentang ketaatan personil terhadap peraturan-peraturan pemerintah/organisasi.(Budi Winarno 2012:186-187). Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan kebijakan adalah. Wewenang. Wewenang ini berbeda-beda antara satu program dengan program yang lain serta mempunyai bentuk yang berbeda. Lindblom menyatakan bahwa kewenangan dapat dipahami dengan baik jika kita mengenal dua jalur dimana orang-orang menggunakan control. Jalur pertama, setiap kali orang ingin menerapkan metode control, ia menerapkan berbagai metode control (antara lain persuasi, ancaman dan tawaran keuntungan) terhadap orang-orang yang akan dikontrolnya. Jalur kedua, pihak pengontrol hanya kadang-kadang saja menggunakan metode-metode itu untuk membujuk

orang-orang yang dikontrolnya agar mentaati peraturan yang ada bahwa mereka harus tunduk terhadapnya. Lindblom mengemukakan ciri-ciri kewenangan, yakni: kewenangan selalu bersifat khusus, kewenangan, baik sukarela maupun paksaan, merupakan konsesi dari mereka yang bersedia tunduk; kewenangan itu rapuh; dan yang terakhir, kewenangan diakui karena berbagai sebab, yakni: .pPertama, sebagian orang beranggapan mereka lebih baik jika ada seseorang yang memerintah. Kedua, kewenangan mungkin juga ada karena adanya ancaman, terror, dibujuk, diberi keuntungan dan lain sebagainya. Fasilitas fisik juga merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

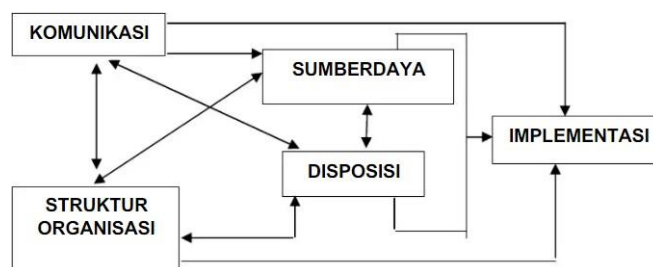
3. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksanan kebijakan merupakan factor ketiga yang mempunyai konsekwensi-konsekwensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards, dampak dari kecenderungan-kecenderungan, banyak kebijakan masuk ke dalam “zona ketidakacuhan”. Ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari paara pelaksana. Jika orang

diminta untuk melaksanakan perintah-perintah yang mereka tidak setuju, maka kesalahan-kesalahan yang tidak dapat dielakkan terjadi, yakni antara keputusan-keputusan kebijakan dan pencapaian kebijakan...

Menurut Edward III dalam Subarsono (2010:92), Implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada suatu implementasi kebijakan. Edward mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan sebagai berikut :

Gambar 1. Teori Implementasi George C. Edward III



Sumber : George C Edward III (dalam Agustino2006)

a. Komunikasi

Komunikasi menentukan implementasi kebijakan publik. Efektivitas implementasi kebijakan tergantung dari adanya pemahaman pembuat keputusan mengenai apa yang dikerjakan. Maka dari itu keputusan serta peraturan kebijakan harus ditransmisikan secara tepat dan akurat kepada implementor. Terdapat 3 indikator komunikasi, yaitu : (1) transmisi yang baik, (2) kejelasan komunikasi dan (3) konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi.

b. Sumberdaya

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Sumber daya sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Kekurangan atau ketidak lengkapan sumber daya baik personal, kewenangan, keuangan dan peralatan akan menyulitkan dalam implementasi kebijakan publik. Indikator dari sumberdaya mencakup beberapa elemen, yaitu : (1) Staff yang mencukupi dan berkompentensi, (2) Informasi cara pelaksanaan data kepatuhan, (3) Wewenang formal, dan (4)Fasilitas.

c. Disposisi

Karakteristik yang dimiliki implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis merupakan arti dari disposisi. Implementator akan menjalankan kebijakan dengan baik apabila memiliki disposisi yang baik. Implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif apabila implementator mempunyai perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Ada beberapa indikator dari disposisi yaitu (1) Pengangkatan birokrat dan (2) Insentif.

d.Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah kebijakan yang melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Struktur birokrasi yang tidak kondusif akan menghambat dan menyebabkan ketidakefektifan implementasi suatu kebijakan. Ada beberapa indikator struktur organisasi, yaitu (1) *Standar Operating Procedure* (SOP) dan (2) Fragmentasi.

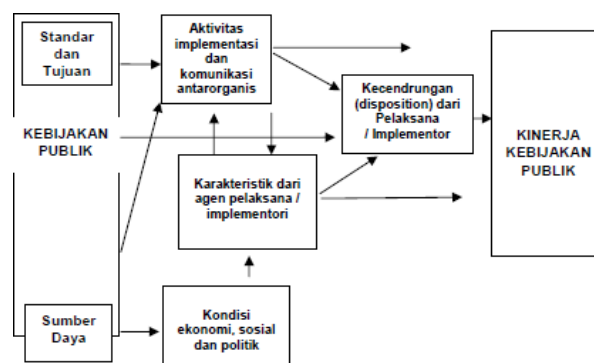
2. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada 6 variabel yang mempengaruhi hasil implementasi kebijakan, yaitu :

- a. Standar dan tujuan kebijakan
- b. Sumberdaya
- c. Komunikasi dan penggunaan paksaan
- d. Disposisi implementor
- e. Karakter lembaga pelaksana
- f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Tujuan dan standar kebijakan adalah faktor krusial pada proses implementasi. Pada kasus tertentu, tujuan dan standar kebijakan mungkin terumuskan dengan jelas dan spesifik, serta relatif mudah diukur. Untuk memperjelas model tersebut Van Meter dan Van Horn menggambarkan modelnya sebagai berikut :

Gambar 2. Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn

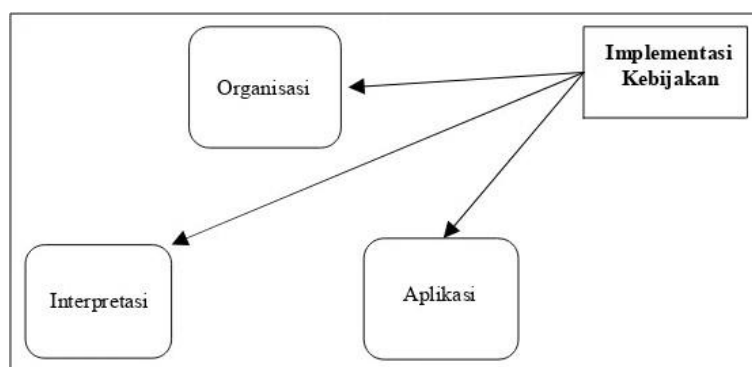


Sumber : Van Meter dan Van Horn (1975)

3. Teori Implementasi Charles O. Jones

Menurut Charles O. Jones (1996:166) implementasi kebijakan adalah aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan program yang dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang dituju. Menurut Charles O. Jones (1996) ada tiga aktivitas utama yang penting dalam implementasi kebijakan, yaitu *organization*, *interpretation*, and *application*.

Gambar 3. Teori Implementasi Charles O. Jones



Sumber : Charles O. Jones (1996)

a. Organisasi (*Organization*)

Organisasi merupakan aktivitas untuk membentuk struktur organisasi yang dapat menetapkan serta menata kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dari sasaran kebijakan.

b. Interpretasi (*Interpretation*)

Aktivitas pelaksana kebijakan yang menjalankan agar program kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat agar dapat diterima dan diwujudkan ataupun direalisasikan oleh sasaran kebijakan.

c. Penerapan (*Application*)

Penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai ketentuan penyediaan dengan melaksanakan kegiatan rutin pelayanan, pembayaran, dan lainnya yang telah diatur sesuai tujuan kebijakan ditentukan.

Menurut Charles O. Jones (1996), Implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Dalam upaya implementasi kebijakan, ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1) Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Tugas aparat pelaksana program memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara.

2) Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3) Penerapan atau Aplikasi

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Maksudnya peraturan atau kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan. Untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

Implementasi telah menjadi suatu wujud utama serta tahap yang menentukan dalam suatu proses kebijakan. Syukur dalam Sumaryadi (2005 : 79) berpandangan bahwa ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- (1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- (3) Unsur pelaksana (*implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

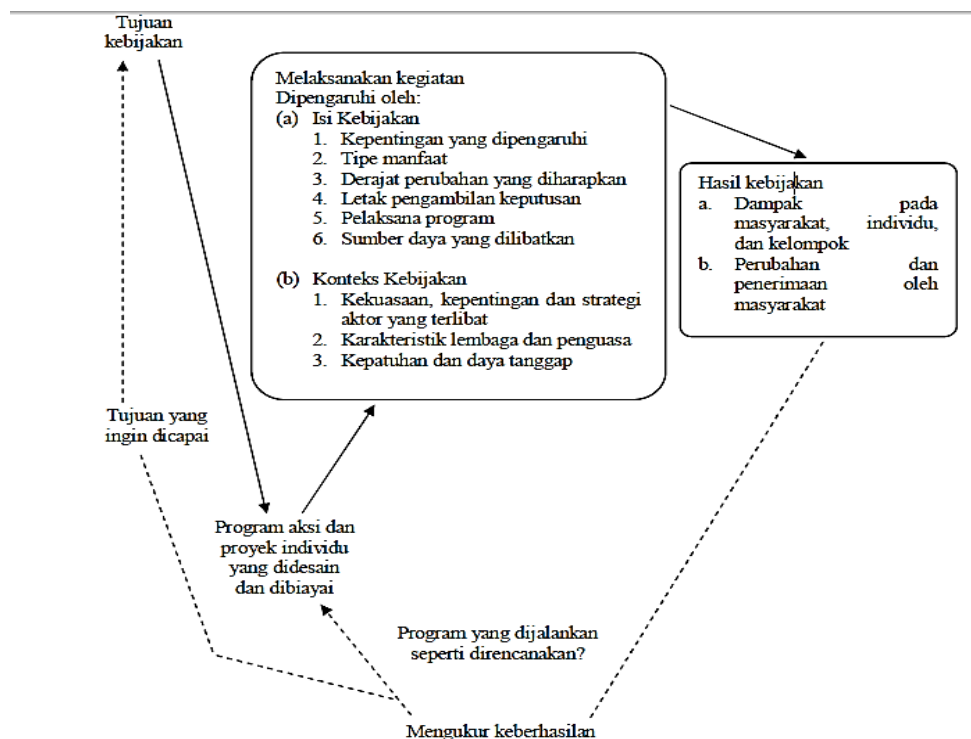
4. Teori Implementasi Marilee S. Grindle

Grindle (2010:29) mengartikan Implementasi sebagai Implementasi kebijakan sesungguhnya tidaklah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur- prosedur rutin

lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Dalam penjelasannya Grindle sendiri telah meramalkan, yang mana dalam setiap implementasi kebijakan pemerintah nantinya akan dihadapkan dengan kendala ataupun hambatan yang utamanya berasal dari tempat diimplementasikan kebijakan sesuai dengan lingkungan tempatnya.

Gambar 4. Model Implementasi Grindle



Sumber : Marilee S. Grindle dalam Wirman Syafri (2010:32)

Menurutnya hasil dari kebijakan atau proses dari pencapaian hasil akhir inilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pengukur keberhasilannya dari

implementasi itu sendiri, dimana dijelaskan sesuai pada skema diatas yang mana dalam mengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan terdapat 2 hal yang bisa dijadikan sebagai acuan, antara lain:

- a. Ditinjau dari prosesnya, yakni dengan mempertanyakan apakah penjelasan kebijakan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan sesuai dengan aksi dari kebijakannya.
- b. Apakah tujuan kebijakan dapat tercapai. Terdapat dua faktor yang diukur dalam menentukan, yakni:
 1. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas :

1. Isi Kebijakan diantaranya mencakup :

- a. Kepentingan yang memengaruhi

Hal ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Tipe Manfaat

Pada point ini diupayakan dalam menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. Pelaksana Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel

demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci.

f. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Sedangkan pada Lingkungan Implementasi sendiri mencakup :

- a. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan dan adanya Respon dari Pelaksana.

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Terdapat berbagai variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik sifatnya individual maupun kelompok atau institusi. Menurut Subarsono (2015:87) “Implementasi kebijakan melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran”.

Dalam implementasi, kebijakan adalah sebuah landasan yang dibuat dalam pelaksanaan program berjalan. Menurut Abdullah dan Smith dalam Tachjan (2008:26), unsur-unsur dalam implementasi kebijakan yaitu: “unsur pelaksana (*implementor*), adanya program yang dilaksanakan, dan target groups”. Menurut Abdul Wahab (1997) , Fungsi implementasi kebijakan adalah memungkinkan tujuan maupun sasaran kebijakan negara membentuk sebuah hubungan yang diwujudkan menjadi sebuah *outcomes*(hasil akhir dilakukan pemerintah).

Grindle (1980) mengemukakan, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sifat serta jenis kepentingan yang hendak dijadikan sebagai tujuan dari kebijakan tersebut yang selanjutnya akan berdampak terhadap aktivitas proses implementasi itu sendiri.

Berdasarkan empat model implementasi yang telah di uraikan, yaitu model implementasi kebijakan George Edwards III, Van Meter dan Van Horn, dan Charles O. Jones serta Marilee S. Grindle, semua bisa digunakan untuk menganalisis hasil penelitian penulis. Namun dalam proses penelitian penulis yang berjudul Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, maka penulis menggunakan konsep teori implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III untuk menganalisis, karena implementasi merupakan proses yang membutuhkan langkah-langkah sistematis yang terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Keempat dimensi tersebut memuat indikator yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

A.2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

1. Evolusi CSR

CSR merupakan konsep yang baru berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggung dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.

Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (*profit, planet* dan *people*) yang digagas Elkington (1998). Dalam bukunya *Cannibals With Forks* :

The Triple Bottom Line in 21st Century Business (1998), Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008).

Berkait dengan konsep tersebut Edi Suharto menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yaitu *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian ketungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*prosecure*) yang tepat dan profesional” (Suharto, 2008b).

Program CSR diperusahaan bergulir secara evolutif. Awalnya CSR bersifat sukarela, yaitu dilaksanakan karena pemilik perusahaan itu memang mau berbuat baik. Mereka mengurangi laba perusahaan, karena uangnya dan sumber dayanya digunakan. Tapi lama kelamaan dengan perjalanan waktu, tekanan dari *stakeholders* kepada perusahaan untuk melakukan tindakan sosial, semakin keras. Keadaan itu yang menjadi suatu tekanan untuk melakukan CSR, walaupun CSR itu sendiri pada tahap evolusi berikutnya telah diyakini sebagai investasi masa depan.

CSR yang kini marak diimplementasikan banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Konsep ini tidak lahir begitu saja. Ada beberapa tahapan sebelum gemanya lebih terasa. Hanya, sejauh ini tidak ada jejak baku yang disepakati secara bulat tentang tahap

perkembangan itu. namun secara garis besar berdasar beberapa literatur, tahap-tahap perkembangannya dapat didiskripsikan.

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tak sekadar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, malainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena, selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat di sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar operasi perusahaan.

Itulah yang kemudian yang melatarbelakangi munculnya konsep CSR yang paling primitif : kedermawanan yang bersifat karitatif. Gema CSR semakin terasa pada **tahun 1960-an** saat dimana secara global, masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, dan mulai menapaki jalan menuju kesejahteraan. Pada waktu itu, persoalan - persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Persoalan ini telah mendorong berkembangnya beragam aktivitas yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan dengan mendorong berkembangnya sektor produktif dari masyarakat.

Gema CSR pada dekade itu juga diramaikan oleh terbitnya buku legendaris yang berjudul “*Silent Spring*”. Di dalam buku ini untuk pertama kalinya persoalan lingkungan diwacanakan dalam tataran global. Penulis buku itu, **Rachel Carson** yang merupakan seorang ibu rumah tangga biasa, mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa betapa mematakannya pestisida bagi lingkungan dan kehidupan. Melalui karyanya itu sepertinya ia ingin menyadarkan bahwa tingkah laku korporasi mesti dicermati sebelum berdampak menuju kehancuran. Sejak itu perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang kian luas.

Pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi juga muncul dalam “*The Future Capitalism*” yang ditulis **Lester Thurow tahun 1966**. Pandangan Thurow pun tak kalah tajamnya. Menurutnya, kapitalisme - yang menjadi *mainstream* saat itu – tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis apa yang nantinya disebut *sustainable society*. Thurow memang agak pesimistis bahwa konsep itu bisa diimplementasikan. Namun demikian, perilaku karitatif sudah mulai banyak digelar oleh korporasi.

Pada **dasawarsa 1970-an**, terbitlah “*The Limits to Growth* “. Buku yang hingga kini terus diperbaharui itu merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome*. Buku ini mengingatkan pada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak ini mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara disisi lain, manusia bertambah secara eksponensial.

Karenanya, eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati – hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemas *philanthropy* serta *Community Development* (CD). Pada dasawarsa ini, terjadi perpindahan penekanan dari fasilitasi dan dukungan pada sektor - sektor produktif ke arah sektor - sektor sosial. Latar belakang perpindahan ini adalah kesadaran bahwa peningkatan produktivitas hanya akan dapat terjadi manakala variabel-variabel yang menahan orang miskin tetap miskin, misalnya pendidikan dan kesehatan dapat dibantu dari luar. Berbagai program populis kemudian banyak dilakukan seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air bersih dan banyak lagi kegiatan sejenisnya.

Di **era 1980-an** makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropisnya ke arah *community Development*. Intinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan pola kedermawanan ala Robbin Hood makin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat semisal pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti-plasma, dan sebagainya.

Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti pendekatan *integral*, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Beragam pendekatan tersebut telah mempengaruhi praktek CD. *Community Development* menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor

karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak.

Pada tataran global, **tahun 1992** diselenggarakan KTT Bumi (*Earth Summit*). KTT yang diadakan di Rio de Janeiro, Brazil ini menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan.

Terobosan besar dalam konteks CSR ini dilakukan oleh **John Elkington** melalui konsep “3P” (*profit, people* dan *planet*) yang dituangkan dalam bukunya “*Cannibals with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*” yang di release pada **tahun 1997**. Ia berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain, maka ia perlu memperhatikan 3P, yakni bukan cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).

Gaung CSR kian bergema setelah diselenggarakannya *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) **tahun 2002** di Johannesburg Afrika Selatan. Sejak saat inilah, definisi CSR mulai berkembang. Yang menarik, sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) misalnya, lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 multinasional company yang berasal dari lebih dari 30 negara itu, dalam publikasinya *Making Good business Sense* mendefinisikan CSR atau tanggung

jawab sosial perusahaan, sebagai “ *Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.* Dalam bahasa bebas kurang lebih maksudnya adalah, komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Versi lain mengenai definisi CSR dilontarkan oleh World bank. Lembaga keuangan global ini memandang CSR sebagai “ *the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. CSR Forum memberikan definisi, “ *CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*”.

Sementara itu sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri mengenai CSR. Uni Eropa (EU Green paper on CSR) mengemukakan bahwa “ *CSR is a concept whereby companies intergrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basic*”.

Lantas bagaimana dengan definisi CSR versi Indonesia? Dari sisi Etimologis CSR kerap diterjemahkan sebagai “ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Dalam konteks lain, CSR kadang juga disebut sebagai “ Tanggung Jawab Sosial Korporasi “ atau “ Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (Tansodus)”. Memang masih diperlukan kajian tersendiri untuk mencari padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia . Namun umumnya, bila disebut salah satu darinya, konotasinya pastilah kembali kepada CSR. Selanjutnya, dari sisi definisi, saat ini juga belum ditemui kesepakatan bakunya, karena umumnya definisi itu masih merujuk pada definisi yang masih umum digunakan di negara lain. Namun demikian, kendatipun tidak mempunyai definisi tunggal, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. (Yusuf Wibisono:2007).

Pandangan CSR yang komprehensif, dilontarkan oleh *Price of Wales Internasional Bussiness Forum* – yang dipromosikan oleh IBL – melalui lima pilar, yaitu :

- a. *Building human capital*
- b. *Strengthening economics*
- c. *Assesing social cohesion*
- d. *Encouraging good governance*
- e. *Protecting the environment.*

2. Prinsip CSR

a. Mutualitas

Tanggung jawab sosial dunia usaha didasari oleh keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban sosial dunia usaha.

b. Sensitivitas

Sensitivitas mendorong dunia usaha selalu memiliki kepekaan terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya, tekanan dan ancaman, kemudian berusaha menyelesaikannya. Tekanan tersebut dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal (masyarakat, LSM, dll).

c. Masyarakat peduli

Prinsip ini memandang, bahwa tanggung jawab sosial dunia usaha merupakan refleksi dari dorongan pentingnya masyarakat peduli. Masyarakat peduli merupakan media untuk meningkatkan partisipasi dunia usaha di bidang kesos. Dunia usaha merupakan salah satu komponen yang memiliki sumber penguatan menjadi pilar partisipasi.

d. Etika

Tanggung jawab sosial adalah bagian dari etika bisnis, yaitu panduan perilaku dunia usaha untuk menjalankan usaha bisnisnya. Etika yang dibangun adalah etika yang didasari oleh norma, budaya masyarakat, regulasi, budaya organisasi yang berpihak kepada lingkungan.

e. Keberpihakan

Tanggung jawab sosial hakekatnya berpihak kepada orang lain yang menerima pelayanan (*Customer Driven*). Setiap bisnis yang dijalankan

oleh setiap dunia usaha bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga berpihak kepada lingkungan sosial seperti kepuasan pelanggan.

f. Inisiatif dari Aktor

Tanggung jawab sosial hakekatnya merupakan manifestasi dari upaya antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dilakukan melalui :

- 1) Kemitraan informal, yaitu bentuk kemitraan yang tidak didasarkan pada aturan – aturan atau memahami dan saling menguntungkan. Biasanya nilai yang menyertainya adalah norma sosial dan etika bisnis.
- 2) Kemitraan formal, yaitu hubungan kemitraan yang didasarkan pada aturan formal yang telah disepakati oleh pihak yang terlibat. Kesepakatan secara tertulis memuat hak dan kewajiban masing – masing pihak dan bersifat memihak.

g. Berkelanjutan

Prinsip ini memandang bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial yang ideal, tidak dilaksanakan secara insidental atau sporadis dalam satuan waktu tertentu, melainkan dilakukan secara berkelanjutan. Tanggung jawab sosial bukanlah menambah ketergantungan orang lain terhadap dunia usaha melainkan mewujudkan kemandirian. Untuk itu usaha yang berkelanjutan benar-benar diutamakan dalam penerapan tanggung jawab sosial dunia usaha.

Prof. Alyson Warhurst dari University of Bath Inggris, tahun 1998 mengajukan prinsip-prinsip CSR sebagai berikut :

1. **Prioritas korporat.** Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara bertanggung jawab secara sosial.
2. **Manajemen terpadu.** Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktek ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen.
3. **Proses perbaikan.** Secara bersinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
4. **Pendidikan karyawan.** Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
5. **Pengkajian.** Melakukan kajian dampak solusi sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
6. **Produk dan jasa.** Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.
7. **Informasi publik.** Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan yang aman,

transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.

8. **Fasilitas dan operasi.** Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
9. **Penelitian.** Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
10. **Prinsip pencegahan.** Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. **Kontraktor dan pemasok.** Mendorong penggunaan prinsip – prinsip tanggung jawab sosial korporat yang dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok, disamping itu bila diperlukan mensyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
12. **Siaga menghadapi darurat.** Menyusun dan merumuskan rencana mnghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama denga layanan gawat darurat, instansi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. **Transfer best practice.** Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sktor publik.

14. **Memberi sumbangan.** Sumbangan untuk usaha bersama pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15. **Keterbukaan.** Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potencial hazard*, dan dampak operasi, prodduk, limbah atau jasa.
16. **Pencapaian dan pelaporan.** Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang – undangan dan menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik. CSR merupakan konsep yang harus berkemban. Ia belum memiliki sebuah defini setandar maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Secara konseptual, CSR juga bersinggung dan bahkan sering dipertukarkan dengan frasa lain, seperti *corporate responsibility*, *corporate sustainability*, *corporate accountability*, *corporate citizenship*, dan *corporate stewardship*.

Pengertian CSR yang relatif lebih mudah dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* (*profit, planet* dan *people*) yang digagas Elkington (1998). Dalam bukunya *Cannibals With Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka

(*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Suharto, 2008).

Berkait dengan konsep tersebut Edi Suharto menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yaitu *procedure*. Dengan demikian, CSR adalah “Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*prosecure*) yang tepat dan profesional” (Suharto, 2008b).

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup enam komponen utama :

1. *The environment*
2. *Community involvement and Development*
3. *Human rights*
4. *Labor practices*
5. *Fair operationg practices*, dan
6. *Consumer issues*.

CSR dipandang sebagai satu dari tiga tanggung jawab utama perusahaan yang mencakup tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. CSR didefinisikan sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

Elemen utama CSR mencakup :

- Hak asasi manusia
- Hak-hak pekerja
- Perlindungan lingkungan
- Relasi dengan pemasok
- Keterlibatan masyarakat
- Hak-hak *stakeholder*
- Monitoring dan *assessment* kinerja CSR

Sejak disahkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, debut CSR di Tanah Air semakin menguat. Hal ini disebabkan, Undang Undang tersebut menyebutkan secara tegas bahwa CSR telah menjadi kewajiban perusahaan. Bunyi pasal yang menyebutkan kewajiban tersebut adalah, “PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan” (Pasal 74 ayat 1).

Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa “Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”

Jika dicermati, peraturan tentang CSR yang relatif lebih terperinci adalah Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang Undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4

Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR. Seperti kita ketahui, CSR milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, dalam buku berjudul *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business*, John Elkington (1997) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial bisnis mencakup tiga aspek, yakni laba, planet/lingkungan dan manusia (3P: *Profit, Planet, People*). Dalam hal ini Suharto menambahkan satu P lagi, yaitu *Procedure*.

Perusahaan yang menjalankan 4P, tidak menerapkan CSR dengan hanya memberi cek atau sponsorsip, melainkan, menjalankannya melalui prosedur (proses dan metode yang benar) secara profesional (melibatkan tenaga ahli dibidangnya). Mengacu pada formula 4P tersebut, ada tiga tipe sikap perusahaan dalam melakukan CSR di tengah badai krisis.

1. **Regresif-surender.** Perusahaan menyerah dan menghentikan kegiatan CSR karena merasa tidak memiliki cukup dana atau mengalihkan dana CSR sebagai beban di saat krisis. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR yang didominasi oleh motif laba (*profit*), akan serta-merta mengurangi dan bahkan menghentikan kegiatan CSR manakala krisis mendera. Untuk menghemat anggaran, menghentikan program CSR dianggap lebih aman dan menguntungkan daripada melakukan PHK.
2. **Pasif-survive.** Perusahaan tetap meneruskan CSR dengan tertatih-tatih, sekadar hidup, dan terus menjalankan CSR seadanya. Perusahaan-perusahaan

yang memperhatikan laba, lingkungan dan manusia secara relatif seimbang, biasanya melihat bahwa meskipun terjadi penurunan produksi dan laba, CSR merupakan ke giatan yang harus tetap dilakukan perusahaan. Para manajer perusahaan merasa bahwa meskipun perusahaan sedang kurang untung, mereka tidak ingin masyarakat dan lingkungan di sekitarnya mengalami”buntung”.

3. **Progresif-sustained.** Selain harus menjalankan CSR, perusahaan yang memperhatikan 4P akan senantiasa berusaha mencari terobosan baru. Sehingga, CSR tetap dijalankan seperti seharusnya. Perusahaan tipe ini melihat CSR seperti halnya “R&D” (*Research and Development*).

Meskipun CSR bukan obat mujarab bagi penghematan biaya, ia tetap memberi manfaat jangka panjang. Seperti dinyatakan Eric Olson, Vice President Advisory Services, *“Like R&D, CSR is about disciplined action and capability-building that sustains and in creases the value of core company assets-your products, your people and trust in your brand-over time.”*

Lahirnya CSR dipengaruhi oleh fenomena DEAF (yang dalam Bahasa Inggris berarti tuli) di dunia industri. DEAF adalah akronim dari Dehumanisasi, Emansipasi, Aquariumisasi, dan Feminisasi (Suharto,2007:103-4);

1. **Dehumanisasi** industri. Efisiensi dan mekanisasi yang semakin menguat di dunia industri telah menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan baik bagi kalangan buruh di perusahaan, maupun bagi masyarakatdi sekitar perusahaan. “Merger mania” dan perampangan perusahaan telah menimbulkan gelombang PHK dan pengangguran. Ekspansi dan

eksploitasi industri telah melahirkan ketimpangan sosial, polusi dan kerusakan lingkungan yang hebat.

2. **Emansipasi** hak-hak publik. Masyarakat kini semakin sadar akan haknya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas berbagai masalah sosial yang seringkali ditimbulkan oleh beroperasinya perusahaan. Kesadaran ini semakin menuntut kepedulian perusahaan bukan saja dalam proses produksi, melainkan pula terhadap berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya.
3. **Aquariumisasi** dunia industri. Dunia kerja kini semakin transparan dan terbuka laksana sebuah akuarium. Perusahaan yang hanya memburu rente ekonomi dan cenderung mengabaikan hukum, prinsip etis dan filantropis tidak akan mendapat dukungan publik. Bahkan dalam banyak kasus, masyarakat menuntut agar perusahaan seperti ini ditutup.
4. **Feminisasi** dunia kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja semakin menuntut penyesuaian perusahaan bukan saja terhadap timbulnya biaya-biaya sosial, seperti penelantaran anak, kenakalan remaja, biaya sosial, akibat berkurangnya atau hilangnya kehadiran ibu-ibu di rumah dan tentunya di lingkungan masyarakat. Pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan perawatan anak (*child care*) atau pusat-pusat kegiatan olahraga dan rekreasi bagi remaja adalah beberapa bentuk respon terhadap isu ini.

Jika dikelompokkan, sedikitnya ada empat manfaat CSR terhadap perusahaan (Wikipedia, 2008):

1. **Brand differentiation.** Dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR bisa memberikan citra perusahaan yang khas, baik, dan etis di mata publik yang pada gilirannya menciptakan *customer loyalty*. The Body Shop sering dianggap sebagai memiliki *image* untuk terkait isu lingkungan.
 2. **Human resources.** Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru, terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. Saat interviu, calon karyawan yang memiliki pendidikan dan pengalaman tinggi sering bertanya tentang CSR dan etika bisnis perusahaan, sebelum mereka memutuskan menerima tawaran. Bagi staf lama, CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi dan motivasi dalam bekerja.
 3. **License to operate.** Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi “izin” atau “restu” bisnis. Karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas.
 4. **Risk management.** Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi, kecelakaan karyawan, atau kerusakan lingkungan. BP dengan bendera “Beyond Petroleum”-nya pernah disanjung sebagai perusahaan “ramah lingkungan”. Namun, pencemaran di teluk Mexico AS telah meruntuhkan *image* tersebut. Membangun budaya “*doing the right thing*” berguna bagi perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis.
- Menurut Archiel B. Carol, ada empat alasan bagi perusahaan untuk menerapkan program CSR, yakni:

1. Tanggung jawab ekonomi. Kata kuncinya adalah *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah fondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terushidup daanberkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya : *obey the law*. Perusahaan harus taat hokum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hokum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *be ethical*.
4. Tanggung jawab filantropi. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hokum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. (Alfitri 2011 : 265).

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik CSR selama ini, tidak semua perusahaan mampu menjalankan CSR secara otentik sesuai filosofi dan konsep CSR yang sejati. Tidak sedikit perusahaan yang terjebak oleh bias-bias CSR berikut ini :

1. **Kamouflase**. Perusahaan melakukan CSR tidak didasari oleh komitmen, melainkan hanya sekedar menutupi praktik bisnis yang memunculkan “*ethical question*”. Bagi perusahaan seperti ini, CD bukan kepanjangan

dari *Community Development*, melainkan “Celana Dalam” yang berfungsi menutupi “aurat” perusahaan. McDonald’s Corporation di AS dan pabrik sepatu Nike di Asia dan Afrika pernah tersandung kasus yang berkaitan dengan “*unnecessary cruelty to animals*”, “*third world nations are exploited in producing these goods*” dan mempekerjakan anak di bawah umur (Wikipedia, 2008; Supomo, 2004).

2. **Generik.** Program CSR terlalu umum dan kurang fokus karena dikembangkan berdasarkan *template* atau program CSR yang telah dilakukan pihak lain. Perusahaan yang inklusif dan pelit biasanya malas melakukan inovasi dan cenderung melakukan “*copy paste*” (kadang dengan sedikit modifikasi) terhadap model CSR yang dianggap mudah dan menguntungkan perusahaan.
3. **Directive.** Kebijakan dan program CSR dirumuskan secara *top down* dan hanya berdasarkan misi dan kepentingan perusahaan (*shareholders*) semata. Program CSR tidak partisipatif sesuai prinsip *stakeholder engagement* yang benar.
4. **Lip Service.** CSR tidak menjadi bagian dari strategi dan kebijakan perusahaan. Biasanya, program CSR tidak didahului oleh *needs assessment* dan hanya diberikan berdasarkan belas kasihan (karitatif). Laporan tahunan CSR yang dibuat Enron dan British American Tobacco (BAT), pernah menjadi sasaran kritik sebagai hanya “*lip service*” belaka (Wikipedia, 2008).

5. **Kiss and Run.** Program CSR bersifat *ad-hoc* dan tidak berkelanjutan. Masyarakat diberi “ciuman” berupa barang, pelayanan atau pelatihan, lantas ditinggalkan begitu saja. Program yang dikembangkan umumnya bersifat *myopic*, berjangka pendek dan tidak memperhatikan makna pemberdayaan dan investasi sosial. CSR sekadar “menanam jagung”, bukan “menanam jati”.

Alhasil, CSR tidak dapat merespon kebutuhan masyarakat dan kurang menyentuh perhatian publik. Salah satu karakter dasar CSR, yakni pemberdayaan masyarakat, menjadi semakin jauh dari pencapaian tujuan CSR. Pelaksanaan CSR yang terjebak bias-bias di atas dapat mengubah singkatan dan makna CSR menjadi :
Candu, Sandera, dan Racun.

Candu. CSR yang sebelumnya dimaksud untuk memberdayakan masyarakat, malah hanya menciptakan ketergantungan masyarakat sebagai penerima program;

Sandera. CSR yang tadinya merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan kepada masyarakat, perusahaan, bergeser menjadi strategi masyarakat untuk menyandera perusahaan, atau sebaliknya, CSR dijadikan alat perusahaan untuk menyandera masyarakat dan menjadikannya “sapi perahan”.

Racun. CSR yang tadinya untuk membangun citra perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berubah menjadi racun yang bukan saja merusak reputasi perusahaan. Melainkan pula menghancurkan modal sosial, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.

CSR yang baik (*good CSR*) memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*, secara harmonis. Ada perbedaan mendasar diantara keempat prinsip tersebut (Supomo, 2004). Tiga prinsip pertama cenderung bersifat *shareholders-driven*, karena lebih memerhatikan kepentingan pemegang saham perusahaan.

Sebagai contoh, *fairness* bisa berupa perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas; *transparency* menunjuk pada penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu; sedangkan *accountability* diwujudkan dalam bentuk fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi yang harus dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, prinsip *responsibility* lebih mencerminkan *stakeholders-driven*, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. *Stakeholders* bisa mencakup karyawan beserta keluarganya, pelanggan, pemasok, komunitas setempat dan masyarakat luas, termasuk pemerintah selaku *regulator*. Di sini, perusahaan bukan saja dituntut mampu menciptakan nilai tambah (*value added*) produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, melainkan pula harus sanggup memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya itu (Supomo, 2004).

Namun demikian, prinsip *good corporate governance* jangan diartikan secara sempit. Artinya, tidak sekadar mengedepankan kredo *beneficence* (*do good principle*), melainkan pula *non-maleficence* (*do no-harm principle*) (Nugroho, 2006).

Perusahaan yang hanya mengedepankan *beneficience* cenderung merasa telah melakukan CSR dengan baik. Misalnya, karena telah memberikan beasiswa atau sunatan massal gratis. Padahal, tanpa sadar dan pada saat yang sama, perusahaan tersebut telah membuat masyarakat semakin bodoh dan berperilaku konsumtif. Misalnya, dengan iklan dan produknya yang melanggar *nonmaleficience*.

Perilaku perusahaan yang beragam ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Elkington (1998) dalam bukunya *Canibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century* peduli terhadap CSR berdasarkan analogi serangga.

Perusahaan kategori pertama laksana **ulat**, yang memiliki model bisnis rakus dan tidak peduli pada lingkungan sekelilingnya. Kategori kedua adalah perusahaan yang mirip **belalang**, model bisnis yang juga eksploitatif dan degeneratif. Kategori kedua ini mungkin saja sudah mulai mempraktikkan CSR. Tetapi, CSR tidak dilakukan dengan sepenuh hati. CD di perusahaan ini hanyalah “Celana Dalam” untuk menutupi “aurat” perusahaan agar terhindar dari tekanan masyarakat atau LSM.

Perusahaan **kupu-kupu** adalah kategori ketiga. Korporasi seperti ini hanya komitmen kuat menjalankan CSR. Bagi perusahaan ini CSR adalah investasi, bukan basa-basi. Kategori terakhir adalah koporasi **lebah**. Perusahaan seperti ini punya sifat *regeneratif* atau menumbuhkan. Perusahaan ideal ini menerapkan etika bisnis dan menjalankan *good CSR*.

B. Teori-Teori Sosiologi yang Relevan

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Terdapat perbedaan bahkan pertentangan pandangan tentang disiplin sosiologi, batas-batas bidang prodi masing-masing. Pertentangannya bersifat politis mengarah ke perebutan pengaruh. Atas dasar perbedaan pandangan mengenai pokok persoalan, terdapat tiga paradigma, yaitu:

1. Fakta Sosial; jenisnya ada material yakni barang sesuatu yang nyata ada dan nonmaterial berupa barang sesuatu yang dianggap ada. Merupakan realitas yang terdiri intrasubyektif dan intersubyektif. Fakta sosial adalah sesuatu yang benar-benar ada seperti struktur sosial dan pranata sosial. Tokohnya adalah Emile Durkheim dengan karyanya yang terkenal adalah *Suicide* dan *The Rule of Social Methode*. Teori-teorinya antara lain Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Teori Sistem dan Teori Sosiologi makro. Metode penelitiannya adalah Interview dan Quisioner.
2. Definisi Sosial; menurut paradigma ini, pokok persoalan sosiologi adalah pendefinisian sosial dan akibat-akibat dari suatu aksi dan interaksi sosial. Sasaran penyelidikannya adalah pemikiran-pemikiran yang bersifat intrasubyektif dan intersubyektif dari aksi dan interaksi sosial. Metodenya *Interpretatif Understanding (Verstehen)*. Paradigma ini memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupannya sendiri. Teori-teori utama dalam paradigma Definisi Sosial adalah : Aksi Sosial, Interaksionisme Simbolik, Fenomenologi, Dramaturgi (Goffman) dan Sosiologi Eksistensi (Manning)

3. Paradigma Perilaku Sosial; fokusnya pada tingkah laku dan perulangannya. Paradigma ini menentang Definisi sosial dengan adanya kebebasan berfikir dan menentang Fakta sosial dengan struktur dan pranata sosialnya. Menurut paradigma ini, konsep-konsep tersebut dapat mengabaikan perhatian kita dari tingkah laku manusia. Teori-teorinya antara lain Sosiologi Behavioral dan Pertukaran sosial. Tokoh-tokohnya Goerge Homan dan Peter Blau. Metodenya Eksperimen di lab dan di lapangan. Melihat ketiga paradigma tersebut dengan keberadaan konsep-konsep teorinya, maka untuk keperluan penelitian peneliti mengambil Paradigma Perilaku Sosial dengan teori utamanya Pertukaran Sosial dan Paradigma Fakta Sosial dengan teori utamanya Struktural Fungsionalisme. Kedua *grand theory* ini yang berperan secara substansial sangat signifikan dalam penelitian ini. Penggunaan teori-teori utama dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan alur pikir dan arah penelitian bisa lebih dekat dan *suitable* dengan topik penelitian. Disamping itu penulis menggunakan teori-teori menengah sebagai penguat seperti Teori Pertukaran Homans, Teori Fungsional Merton, Teori Pemberdayaan dan Teori Kesejahteraan.

B. 1 Teori Pertukaran Sosial

Teori Pertukaran menurut Kamus Besar Sosiologi adalah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan dan menghindari biaya. (Alex Sobur 2016:779). Menurut Teori Pertukaran Sosial,

orang memasuki dan meneruskan pola interaksi dengan orang lain tertentu oleh karena mereka menganggap interaksi demikian itu menguntungkan, apa pun yang menjadi alasannya. Akan tetapi, dalam proses mencari imbalan, orang pasti memikul biaya. Biaya menunjuk pada pertimbangan negative (kewajiban, kelelahan, kebosanan, kecemasan, keprihatinan, dan seterusnya) atau pada unsur positif yang dikorbankan dengan jalan tetap meneruskan hubungan. Keuntungan yang diperoleh dari pertukaran sosial menggambarkan perbedaan antara imbalan dengan biaya.

Beberapa ahli sosiologi (Helal, 1976 dalam Sunarto, 1985) melihat tukar menukar sosial sebagai suatu “Teori Pilihan Rasional” oleh karena individu tampak hanya meneruskan suatu hubungan sepanjang mereka menetapkannya sebagai hal yang lebih membawa imbalan daripada biaya.

Peter Blau (1967 dalam Sunarto, 1985), seorang ahli teori pertukaran sosial, mengemukakan bahwa tidaklah dapat dihindarkan bahwa orang pada umumnya memperoleh teman, kekasih, dan teman hidup yang “sepantasnya mereka peroleh”. Ia menyatakan bahwa jika manusia mau memperoleh manfaat dari hubungan dengan orang lain, mereka harus menawarkan cukup banyak hal kepada partner mereka agar yang bersangkutan merasakan adanya manfaat untuk tetap memelihara hubungan. Sehubungan dengan itu, orang lain harus menawarkan lebih banyak sebelum mereka dapat memperoleh persahabatan dengan orang semacam itu. Dengan cara ini prinsip penawaran dan permintaan menjamin bahwa orang hanya akan memperoleh partner yang sama layaknya dengan apa yang mereka pantas peroleh. Ahli sosiologi lain yang biasanya dikenal

sebagai ahli teori tukar menukar sosial James S.Coleman (1973), Gorge C.Homans (1974) dan Peter P.Ekeh (1974) (Sunarto dalam Alex Sobur 2014:780).

Manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi tergantung kepada manusia lain dan atau lingkungan sekitarnya. Dalam sebuah masyarakat, terdapat individu-individu yang saling memiliki tujuan-tujuan yang bersifat individual dalam rangka mengejar kepentingan pribadinya. Dimana individu bertindak untuk menghindari penderitaan dan memaksimalkan kesenangan. Hubungan antar individu-individu dikenal dengan adanya interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhannya dalam sebuah hubungan yang bersifat pertukaran. Dalam pertukaran terjadi interaksi antar individu-individu dalam sebuah hubungan yang bersifat timbal balik, karena masing-masing berusaha untuk mengejar kebutuhannya sendiri serta kepentingannya secara rasional. Hasil dari kumpulan (*agregation*) sejumlah individu-individu yang bersifat timbal balik tersebut menghasilkan pertukaran sosial dalam sebuah struktur sosial. Pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan, dan persahabatan.

Asumsinya bahwa, transaksi-transaksi pertukaran akan terjadi hanya apabila kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat dengan baik sekali dijamin apabila individu-individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya melalui pertukaran-pertukaran yang dinegosiasikan secara pribadi. Teori Pertukaran digunakan untuk mencermati pada tingkat analisa mikro, khususnya cocok dengan tingkat kenyataan sosial antar pribadi (*interpersonal*). Ciri khas

teori pertukaran adalah adanya hubungan sosial menurut atau membutuhkan biaya/pengorbanan (*cost*) dan penghargaan/imbalan (*reward*).

Inti dari teori pertukaran sosial adalah perilaku sosial seseorang hanya bisa dijelaskan oleh sesuatu yang bisa diamati, bukan oleh proses mentalistik (*block-box*). Teori Pertukaran Sosial adalah teori yang termasuk dalam paradigma yang mempelajari perilaku manusia secara terus-menerus di dalam hidupnya. Teori pertukaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan Peter Blau menggabungkan tingkah laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau negara. Blau memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang lebih luas berdasarkan analisis proses-proses sosial yang terjadi pada relasi diantara individu. Menurut Blau, terdapat 3 (tiga) tipologi atau model pertukaran sosial yaitu instrinsik, ekstrinsik dan bauran. Hal ini menegaskan bahwa Blau mengembangkan teori pertukaran Homans dari level mikro ke level makro. (Iqbal L 2021:17)

B. 2. Teori Struktural Fungsional

Paradigma Fakta Sosial ini melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makrostrukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari apakah individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Teori-teori besar yang ada dalam lingkup paradigma fakta sosial, antara lain : (a) teori struktural fungsional; b) teori struktural konflik, atau kerap disebut teori konflik; c) teori system; dan d) teori-teori sosiologi makro lainnya. Teori-teori ini pada dasarnya

menganalisis peran dan pengaruh dari struktur sosial terhadap individu dalam masyarakat, seperti pranata-pranata sosial, norma sosial, kelas sosial, social control, atau kekuasaan dan lain-lain; yang tampak berada di luar individu, akan tetapi dapat memengaruhi kelangsungan dan mungkin juga perubahan dalam masyarakat yang bersangkutan (Veeger dalam Wirawan 2015:3).

Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu system sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menekankan kepada kebenaran dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam system sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur ini tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya sesuai dengan filosofinya yang menekankan pada harmoni dan keberaturan, dalam pandangan teori ini setiap bagian dari system sosial saling komplementer dan terintegrasi. Disamping itu, nilai sosial juga dianggap sebagai instrument system sosial untuk menjaga keberaturan. Nilai sosial itu sendiri muncul sebagai hasil dari konsensus, oleh sebab itu dalam masyarakat yang berbeda dapat memiliki nilai sosial yang berbeda pula. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat nilai sosial tersebut akan menjadi pedoman dalam menunaikan peranan sosial setiap unsur dari system. Dengan demikian, pada sisi yang lain nilai sosial akan berperan sebagai instrument *control social* terhadap perilaku warga masyarakatnya. (Soetomo 2010:73)

Pembahasan Teori Struktural Fungsional dari Parsons akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua system “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL. Setelah membahas empat fungsi ini lalu dianalisis pemikiran Parson mengenai struktur dan system.

AGIL. Suatu fungsi (*function*) adalah “kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan system”. (Rocher dalam Ritzer dan Goodman 121: 2004). Dengan menggunakan definisi ini, Parsons yakin bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan semua sistem - *Adaptation* (A), *Goal Attainment* (G), *Integration* (I), dan *Latency* (L) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperative fungsional ini dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (*survive*), suatu system harus memiliki empat fungsi ini :

1. *Adaptation* (Adaptasi) : Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. *Goal Attainment* (Pencapaian tujuan) : Sebuah system harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. *Integratin* (Integrasi) : Sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L).
4. *Latency* (Pemeliharaan pola) : Sebuah system harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Parsons mendesain skema AGIL ini untuk menggunakan disemua tingkat dalam system teoritisnya. Dalam bahasan tentang empat system tindakan dibawah, akan dicontohkan bagaimana cara Parson menggunakan Skema AGIL.

Organisme perilaku, adalah system tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan merubah lingkungan eksternal.

Sistem Kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan system dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem social menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Terakhir, system *Kultural* melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan actor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak.

Teori Struktural Fungsional dari Parsons (1851) yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:

- a) Adaptasi terhadap kebutuhan situasional;
- b) Pencapaian tujuan-tujuan;
- c) Integrasi atau pengaturan tata-hubungan;
- d) Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu;

Menurut Parsons, suatu sistem sosial agar tetap bertahan (*survive*), harus memiliki empat fungsi yang akronimnya AGIL ini, yaitu: A (*Adaptation*, adaptasi) – G (*Goal Attainment*, pencapaian tujuan) – I (*Integration*, integrasi) – L (*Latency*, latensi, pemeliharaan pola), yang keempat-empatnya beroperasi dalam relasi input-output dalam masyarakat.

Adaptasi (*Adaptation*) merupakan suatu keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya.

Pencapaian tujuan (*goal attainment*), artinya bahwa setiap sistem haruslah mempunyai suatu alat yang mampu menggerakkan sumber daya agar kegiatannya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan itu perlu diadakan prioritas pelaksanaannya agar kegiatannya berjalan secara terencana.

Integrasi (*Integration*)

Latent Pattern Maintenance, adalah persyaratan fungsional yang berkaitan dengan: upaya menjaga sistem untuk tetap seimbang; upaya mengikat individu dalam sistem; upaya bersiap-siap bilamana sewaktu-waktu ada para anggota bertindak diluar sistem (Doyle Paul Johnson, 1986: 128-131, bandingkan Peter Hamilton, 1990 : J 78).

B. 3. Konsep dan Teori Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan/pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan/keberdayaan) kekuasaan sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk. membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Memberi kekuasaan atau mendelegasikan kewenangan kepada Masyarakat, agar masyarakat memiliki Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan untuk membangun diri dan Lingkungannya.

Kata pemberdayaan mengesankan "arti tangguh atau kuat" Menurut Rappaport (1985) praktek yang berdasarkan pemberdayaan adalah suatu bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam simbol-simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk merubah hal-hal yang terkandung dalam diri seseorang, orang yang dianggap penting serta masyarakat sekitarnya. Pemberdayaan berarti menampilkan peran-peran aktif dan kerjasama bagi para klien atau penerima pelayanan dengan mitranya. Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas melimpahkan kekuasaan kepada orang lain.

Menurut Mardikanto (2003), Pemberdayaan merupakan Proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui *proses belajar bersama* yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, dan yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Menurut Slamet (1989), Pemberdayaan adalah Pemberdayaan pada dasarnya merupakan bagian integral dan sekaligus sarana penalaran atau bahkan penentuan kegiatan pembangunan, sehingga perlu penekanan pada :

- Perubahan Administrasi pemberdayaan dari yang bersifat “regulatif Sentralistis”, menjadi “fasilitatif partisipatif”.

- Pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai “*local agricultural practices*”

Pemberdayaan adalah proses transformasi power pada yang lemah (*powerlessness*) dan peningkatan kemampuan agar secara mandiri mampu mengurus kehidupannya (Arai, 1995). Pemberdayaan adalah proses yang dimana seseorang, organisasi, dan masyarakat mampu mengurus kebutuhan dan permasalahannya sendiri. (Rappaport, 1987).

Komponen Dasar Konsep Pemberdayaan

- a. Pada Tingkatan Individu; : Partisipasi dengan lainnya untuk mencapai tujuan.
Mampu memperoleh akses berbagai sumberdaya; Memahami hal-hal rawan dalam lingkungan sosial politiknya .
- b. Pada Tingkatan Organisasi : Pemberdayaan mencakup struktur dan proses organisasi yang memperkuat partisipasi anggota dan peningkatan kinerja Untuk tujuan organisasi.
- c. Pada Tingkatan Masyarakat : pemberdayaan merujuk pada tindakan kolektif untuk peningkatan kualitas hidup di masyarakat dan hubungan antar masyarakat.

Model Pemberdayaan Masyarakat ada tiga :

1. Model Pemberdayaan Masyarakat “Daun” adalah pemberdayaan masyarakat berupa tindakan kreatif pemberian bantuan kepada masyarakat yang tak berdaya.

2. Model Pemberdayaan Masyarakat “Batang” adalah pemberdayaan berupa peningkatan sumber daya manusia, sikap-mental, dan akses kesehatan, pendidikan, informasi, dll.
3. Model Pemberdayaan Masyarakat “Akar” adalah model pemberdayaan berupa perubahan sistem, kebijakan, dan struktur (POLEKSOSBUD) yang lebih memihak rakyat.

Hasil-hasil pemberdayaan dapat dilihat pada :

1. Tingkat Individu : Merasa mampu mengontrol situasi dan memiliki ketrampilan mobilisasi sumberdaya
2. Tingkat Organisasi : Tumbuh dan berkembangnya jejaring organisasi dan perluasan pengaruh kebijakan.
3. Tingkat masyarakat: Membuktikan adanya variasi, eksistensi koalisi organisasi, dan akses sumberdaya masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

1. **Mengerjakan** : artinya Kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan / menerapkan sesuatu. Karena melalui “**mengerjakan**” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.
2. **Akibat**, artinya : kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau mengarah yang baik/bermanfaat; karena, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ pemberdayaan di masa-masa mendatang.

3. *Asosiasi*, artinya : setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peristiwa yang lainnya.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya, yang artinya “kekuatan”, dan dalam Bahasa Inggris disebut “empowerment”. Jika dijabarkan, pemberdayaan mengandung arti memberikan daya kepada orang atau kelompok yang belum berdaya. Menurut Mardikanto (2015 : 28), pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan social (pendidikan dan kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran

Suharto (2017:58), mendefinisikan pemberdayaan sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering kali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut Hendrawati (2018:9) pemberdayaan adalah memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari-hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah.papan, pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya, Suharto (2017:58) dalam bukunya mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artian bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Menurut Mardikanto (2015:111), tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Perbaikan Pendidikan

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk Pendidikan yang lebih baik. Perbaikan Pendidikan dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan Pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.

2. Perbaikan Aksesibilitas

Melalui tumbuhnya semangat untuk belajar seumur hidup, diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitasnya, terutama yang

berkaitan dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran.

3. Perbaikan Tindakan

Dengan bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas beragam sumber daya, diharapkan mampu menghasilkan Tindakan-tindakan yang lebih baik.

4. Perbaikan Kelembagaan

Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Pada dasarnya, kegiatan pemberdayaan ditujukan untuk mencapai perubahan perilaku masyarakat dengan tujuan memperbaiki kualitas hidup masyarakat tersebut. Perbaikan kualitas hidup tersebut mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Adapun ruang lingkup pemberdayaan masyarakat (Mardikanto, 2015:223), antara lain :

1. Bina Manusia

Tujuan utama pemberdayaan adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh sebab itu, lingkup materi pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada dua hal tersebut :

a. Peningkatan Kemampuan Dasar

Dalam konsep Pendidikan, yang dimaksud kemampuan setiap individu mencakup ranah pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*).

Dunia Pendidikan kita terlalu terpusat pada aspek pengetahuan (*kognitif*), sedikit ranah keterampilan (*psikomotorik*), dan kurang memperhatikan ranah sikap (*afektif*). Terkait hal tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat melalui proses pemberdayaan diutamakan kepada sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian.

Kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu pada kebutuhan pasar serta optimalisasi sumber daya lokal. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif yang dimiliki dan atau tersedia dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing.

Sikap professional dimaksud sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Dalam pengertian ini, loyalitas terhadap profesi menjadi lebih penting dibandingkan sekedar loyal kepada institusinya.

Kemandirian bukan diartikan sebagai berdikari, melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi diri sendiri dan masyarakat. Artinya, tidak menolak

bantuan dari pihak luar, melainkan berani menolak bantuan yang akan merugikan dan menciptakan ketergantungan.

Namun demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus tetap mengikuti kemajuahn ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu produk, meningkatkan efisiensi, serta daya saing produk yang dihasilkan.

b. Peningkatan posisi-tawar Masyarakat

Terkait posisi-tawar masyarakat, pengorganisasian masyarakat akan memainkan peran strategis. Tidak hanya menyusun kekuatan bersama, tetapi juga dalam membangun jejaring antar pemangku kepentingan. Dalam meningkatkan posisi-tawar tersebut, peningkatan daya saing yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing potensial dapat dijadikan mitra strategis.

2. Bina Usaha

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti :

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu, dan nilai tambah produk

- b. Perbaiki manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan local
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat

Bina Usaha ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan modal dari masyarakat maupun pelaku usaha ekonomi lemah. Bukan hanya lemah dalam kepemilikan modal, melainkan juga lemah keterampilan, lemah pengetahuan, bahkan lemah dalam semangatnya untuk maju.

3. Bina Lingkungan

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sejak awal tahun 1970-an telah membawa dampak negative sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran lingkungan dari limbah industri/pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi hal tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

Pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan (ekosistem), sehingga kelestarian alam dapat terjaga,

terjauh dari bencana alam, bahkan dapat kita turunkan ke generasi selanjutnya.

4. Bina Kelembagaan

Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan dapat berjalan secara baik apabila terdapat kelembagaan yang berfungsi secara efektif. Artinya, Bina Kelembagaan tidak hanya sekedar membentuk lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi jauh lebih penting untuk memperhatikan kinerja dari Lembaga tersebut apakah sudah efektif atau belum.

Melalui kinerja lembaga yang efektif, tentu segala proses pemberdayaan dapat berjalan dengan lancar guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Adapun ruang lingkup pemberdayaan masyarakat ada empat Bina menurut (Mardikanto, 2015:223), antara lain :

1. Bina Manusia :

- a. Pengembangan Kapasitas individu : (kepribadian, dunia kerja, pengembangan keprofesionalan)
- b. Pengembangan kapasitas Entitas/kelembagaan
 - 1). kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi,
 - 2). kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan struktur organisasi.
 - 3). Proses organisasi, kompetensi, strategi organisasi.
 - 4). Pengembangan jumlah dan mutu sumberdaya.
- c. Serta Pengembangan kapasitas sistem (jejaring) :

1) Pengembangan interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama.

2) Pengembangan Interaksi dengan entitas/organisasi di luar sistem.

Tujuan utama pemberdayaan adalah keberdayaan (kemampuan dan perbaikan posisi-tawar) masyarakat. Oleh sebab itu, lingkup materi pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada dua hal tersebut :

3) Peningkatan Kemampuan Dasar

Dalam konsep Pendidikan, yang dimaksud kemampuan setiap individu mencakup ranah pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*).

Dunia Pendidikan kita terlalu terpusat pada aspek pengetahuan (*kognitif*), sedikit ranah keterampilan (*psikomotorik*), dan kurang memperhatikan ranah sikap (*afektif*). Terkait hal tersebut, maka peningkatan kemampuan masyarakat melalui proses pemberdayaan diutamakan kepada sikap-sikap kewirausahaan, profesionalisme, dan kemandirian.

Kewirausahaan adalah sikap inovatif, mengacu pada kebutuhan pasar serta optimalisasi sumber daya lokal. Kegiatan kewirausahaan diarahkan untuk menggali keunggulan komparatif yang dimiliki dan atau tersedianya dilokalitasnya untuk diubah menjadi keunggulan bersaing.

Sikap professional dimaksud sebagai terus menerus mengembangkan keahlian sesuai kompetensinya, bangga dan

mencintai profesinya, serta memegang teguh etika profesinya. Dalam pengertian ini, loyalitas terhadap profesi menjadi lebih penting dibandingkan sekedar loyal kepada institusinya.

Kemandirian bukan diartikan sebagai berdikari, melainkan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi diri sendiri dan masyarakat. Artinya, tidak menolak bantuan dari pihak luar, melainkan berani menolak bantuan yang akan merugikan dan menciptakan ketergantungan.

Namun demikian, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus tetap mengikuti kemajuahn ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu produk, meningkatkan efisiensi, serta daya saing produk yang dihasilkan.

4) Peningkatan posisi-tawar Masyarakat

Terkait posisi-tawar masyarakat, pengorganisasian masyarakat akan memainkan peran strategis. Tidak hanya Menyusun kekuatan Bersama, tetapi juga dalam membangun jejaring antar pemangku kepentingan. Dalam meningkatkan posisi-tawar tersebut, peningkatan daya saing yang terbaik adalah membangun sinergi, dengan mengupayakan agar pesaing potensial dapat dijadikan mitra strategi.

2. Bina Usaha :

Bina usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti :

- a. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu, dan nilai tambah produk
- b. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan
- c. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan local
- d. Peningkatan aksesibilitas terhadap modal, pasar, dan informasi
- e. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan ekonomi rakyat

Bina Usaha ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan modal dari masyarakat maupun pelaku usaha ekonomi lemah. Bukan hanya lemah dalam kepemilikan modal, melainkan juga lemah keterampilan, lemah pengetahuan, bahkan lemah dalam semangatnya untuk maju.

Wujud kegiatan bina usaha dapat juga berupa :

- a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha;
- b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis;
- c. Pembentukan Badan Usaha;

- d. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-sumber pembiayaan;
 - e. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;
 - f. Manajemen Produksi dan Operasi;
 - g. Manajemen Logistik dan Finansial;
 - h. Penelitian dan pengembangan;
 - i. Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Bisnis;
 - j. Pengembangan jejaring dan kemitraan;
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.
3. Bina Lingkungan :

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia sejak awal tahun 1970-an telah membawa dampak negative sebagai perusak hutan terbesar, pencemaran lingkungan dari limbah industry/pertanian/rumah tangga, serta perusak lahan dari kegiatan pertambangan. Menghadapi hal tersebut, upaya pemberdayaan masyarakat terhadap kesadaran lingkungan (sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lain) sudah saatnya memperoleh perhatian yang serius.

Pemberdayaan masyarakat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan (ekosistem), sehingga kelestarian alam dapat terjaga, terjauh dari bencana alam, bahkan dapat kita turunkan ke generasi selanjutnya.

Sejak munculnya konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), isu lingkungan menjadi sangat penting. Muncul kewajiban

dilakukannya AMDAL (Analisis Manfaat dan dampak Lingkungan) dalam setiap investasi, ISO 1400 tentang keamanan lingkungan.

Pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya bahan baku). Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis & kehidupan.

Oleh karena itu muncul Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya memuat tanggungjawab sosial oleh penanam modal.

Tanggung Jawab Sosial adalah segala kewajiban yang harus dilakukan yang terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan sosial masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan (area kerja), maupun yang mengalami dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal.

Tanggung jawab lingkungan adalah kewajiban dipenuhinya segala ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

4. Bina Kelembagaan : Suatu bentuk relasi sosial dapat disebut sebuah kelembagaan apabila memiliki empat komponen, yaitu adanya:
 - a. Komponen person;
 - b. Komponen kepentingan;

- c. Komponen aturan;
- d. Komponen struktur (setiap orang memiliki posisi dan peran).

Terkait bina kelembagaan, misalnya dalam bidang agribisnis, diperlukan beragam kelembagaan. Mosher (1969) menyatakan bahwa untuk membangun struktur pedesaan yang progresif dibutuhkan kelembagaan-kelembagaan :

- 1) Sarana produksi dan peralatan pertanian
- 2) Kredit produksi
- 3) Pemasaran produksi
- 4) Percobaan/pengujian lokal
- 5) Penyuluhan, dan
- 6) Transportasi.

Keenam jenis kelembagaan tersebut, harus tersedia di setiap lokalitas usaha warga dan memiliki keterkaitan dengan lembaga sejenis di tingkat nasional.

Syahyuti (2007) menawarkan 8 kelembagaan dalam pengembangan agribisnis:

1. Kelembagaan penyediaan input usaha tani;
2. Permodalan;
3. Pemenuhan tenaga kerja;
4. Penyediaan lahan dan air irigasi;
5. Kelembagaan usaha tani;
6. Pengelolaan hasil pertanian;
7. Pemasaran hasil pertanian;
8. Penyediaan informasi (teknologi, pasar, dll).

Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari aspek Ekonomi :

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan berskala kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Kurangnya Akses masyarakat Kepada input Sumber Daya ekonomi misalnya Modal Usaha, Informasi Pasar dan Teknologi.
3. Lemahnya Kemampuan masyarakat. Ekonomi lemah untuk membangun organisasi ekonomi masyarakat (perusahaan) yang memiliki *bargaining position* dan daya saing menghadapi perusahaan besar.

Jenis aktivitas pemberdayaan ada tiga, yakni :

1. Pemberdayaan individu, suatu aktivitas yang secara maksimal untuk meningkatkan kekuatan yang bersangkutan berdasarkan pada sebagian besar potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan individu sangat erat dengan konsep-konsep kebutuhan manusia dan pemberdayaan individu berakhir pada rasa memiliki yang positif dari masing-masing individu.
2. Pemberdayaan keluarga, adalah suatu upaya yang dilakukan, memperkuat kemampuan dengan melibatkan keluarga disesuaikan dengan sumber-sumber keluarga dengan tujuan memandirikan keluarga tersebut. Pemenuhan kebutuhan keluarga harus diusahakan secara gotong royong dengan melibatkan seluruh anggota keluarga tanpa membedakan jenis kelamin dan status anggota keluarga, maka diperlukan pembagian kerja.
3. Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan akumulasi dari pemberdayaan individu dan keluarga masyarakat merupakan kumpulan

individu/keluarga yang dalam suatu tatanan yang saling mempengaruhi. Seluruh masyarakat berkaitan dengan aktivitas makro yang dimiliki melalui seluruh masyarakat dalam konteks pengembangan potensi yang dimiliki melalui metode pekerjaan sosial dengan masyarakat.

Disamping itu, pemberdayaan memiliki strategi dan langkah-langkah serta Indikator. Dikutip modul pemberdayaan masyarakat Kemdikbud, strategi-strategi yang dapat digunakan dalam pemberdayaan komunitas meliputi: - Metode Pendekatan yang Sesuai Terdapat tiga cara pendekatan, yaitu: Pertama, pendekatan kesejahteraan dengan berpusat pada pemberian bantuan kepada komunitas untuk menghadapi bencana. Misalnya, komunitas yang terkena bencana alam. Kedua, pendekatan pembangunan dengan berpusat pada peningkatan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan komunitas. Misalnya, pemberian dana bantuan untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut. Ketiga, pendekatan pemberdayaan dengan melatih komunitas mengatasi ketidakberdayaannya, agar segera terlepas dari ketidakberdayaan tersebut. Di sini, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari proses politik. Misalnya, pemberian modal usaha. Dari ulasan modul sosiologi paket c yang dikeluarkan Kemdikbud tahun 2020, dijelaskan dua jenis pendekatan dalam perencanaan untuk mengenali kebutuhan komunitas. Pertama, pendekatan teknokrat (top down) yaitu perencanaan kebutuhan untuk mengatasi masalah komunitas disimpulkan berdasarkan data dan hasil pengamatan dari pengamat profesional. Di sini, komunitas hanya berperan sebagai penonton. Kedua, pendekatan partisipatif (bottom up) yaitu dalam setiap perencanaan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan yang terlibat. Dalam hal ini, komunitas sebagai subyek pembangunan berhak memberikan aspirasi dalam penyusunan rencana pembangunan. - Komunikasi yang Baik Dalam proses pemberdayaan diperlukan satu pemahaman yang sama, dari setiap anggota komunitas dengan agen pemberdaya. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.¹⁷ 16 Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 22 17 Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat.....* hlm, 50

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai **empowerment index** atau indeks pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan di dalam (power within), kekuasaan untuk (power to), kekuasaan atas (power over), dan kekuasaan dengan (power with). indikator keberdayaan, meliputi:

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, gula, minyak goreng dan bumbu dapur); kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Seperti TV, HP, lemari pakaian, kulkas. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri mengenai keputusan-keputusan keluarga. Misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian hewan ternak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama

- presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap berdaya, jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarga; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial.
 - h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.
- (Edi Suharto)

Langkah-Langkah Pemberdayaan Komunitas

Dalam lingkup umum maupun khusus, terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan komunitas. Di antaranya, menganalisis kebutuhan komunitas dan situasi sosial. Potensi, kelemahan, peluang, ancaman, dan hambatan yang mempengaruhi komunitas harus diidentifikasi secara tepat. Kemudian, merumuskan masalah dari hasil identifikasi tersebut. Perumusan masalah dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, rapat desa, atau penelitian berupa survei, wawancara, maupun observasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekeliruan pemetaan dalam pemberdayaan, serta untuk mengenali dengan benar kebutuhan yang diperlukan komunitas. Langkah selanjutnya adalah menemukan berbagai program yang relevan dengan analisis kebutuhan dan situasi sosial dari komunitas. Program-program tersebut harus layak dijadikan sebagai basis pengembangan masyarakat. Kemudian berlanjut untuk menentukan alternatif program yang

diprioritaskan. Setelah itu, melakukan aksi pemberdayaan sesuai dengan urutan program prioritas tersebut. Untuk mengukur keberhasilannya, perlu dirumuskan tujuan yang akan dicapai pada setiap program. Tujuan yang baik memiliki karakteristik gambaran yang jelas dan spesifik. Terdapat cerminan tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan perhitungan dana, waktu, dan sumber daya. Selanjutnya, melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan atau monitoring bertujuan untuk memastikan kegiatan pemberdayaan dapat berjalan sesuai rencana. Sementara, evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan program dengan menganalisis faktor penyebabnya. Melalui evaluasi tersebut, maka akan ditetapkan program tindaklanjut berikutnya. Baca selengkapnya di artikel "Mengenal Strategi dan Langkah-Langkah Pemberdayaan Komunitas", <https://tirto.id/gabV>

B. 4. Teori Kesejahteraan

James Midgley (1997:5), Kesejahteraan Sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama:

1. Masalah sosial dapat dimenej dengan baik,
2. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, dan
3. Peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Midgley, mendefinisikan Kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being.*” Terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, rumah, dan penghasilan dapat dipenuhi, serta manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat 1, menyatakan “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial Warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy & Liermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2006), Kesejahteraan sosial mengandung empat arti :

1. Sebagai Kondisi Sejahtera (*well-being*); kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material.
2. Sebagai Pelayanan sosial; pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni : Jaminan sosial, Pelayanan kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Pelayanan sosial personal.
3. Sebagai Tunjangan Sosial; diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur. Keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan yang lebih tepat disebut “*social illfare*” ketimbang “*social welfare*”. (Linda Gordon dlm Charles Zastrow (2000a : 21).
4. Sebagai Proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan menyelenggarakan pelayanan sosial.

Tujuan Kesejahteraan Sosial adalah Untuk Mencapai Kehidupan yang Sejahtera, Tercapainya Standar Kehidupan Pokok : Sandang, Pangan, Perumahan, Kesehatan, dan Relasi Sosial. Serta untuk mencapai Penyesuaian Diri yang baik

dengan lingkungannya. Teori Kesejahteraan Menurut Pigou (1960); teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan et al., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga, kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat. Fergusson et al., (1981); Martin (2006) menyatakan bahwa terminologi yang sering digunakan dalam penelitian yang membahas kesejahteraan adalah *standard living*, *well-being*, *welfare*, dan *quality of life*. Menurut Just et al., 1982, dalam kajian ekonomi kesejahteraan yang bertujuan untuk menolong masyarakat membuat pilihan yang lebih baik, kesejahteraan seseorang dilihat dari *willingness to pay* saat individu atau masyarakat berperan sebagai konsumen. Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi

pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut (Sawidak, 1985). Tingkat kepuasan yang terkait emosional akan mempengaruhi aspek tingkah laku individu untuk menilai kepuasan pada variabel-variabel lainnya seperti kepuasan pada kualitas kehidupan (Currivan, 1999; Lambert et al., 2001; Robbins dan Judge, 2007; Falkenburg dan Schyns, 2007). Nilai kepuasan emosional juga akan meningkatkan kinerja dan kontribusi individu pada lingkungannya (Lock, 1976; Viswesvaran dan Ones, 2000; Butler dan Rose, 2011). Sayogyo (1984) mengkaji kesejahteraan dan mendefinisikan kesejahteraan keluarga sebagai penjabaran delapan jalur pemerataan dalam trilogi pembangunan sejak Repelita III, yaitu: 1) peluang berusaha; 2) peluang bekerja; 3) tingkat pendapatan; 4) tingkat pangan, sandang, perumahan; 5) tingkat pendidikan dan kesehatan; 6) peran serta; 7) pemerataan antar daerah, desa/kota; dan 8) kesamaan dalam hukum.

Mirrowsky dan Ross (1989) mengkaji kajian kesejahteraan dengan penyakit, kesakitan, kesulitan ekonomi yang dihubungkan dengan depresi. Kepuasan hidup sebagai bagian dari dimensi kesejahteraan meliputi kesehatan, penerimaan terhadap kecukupan ekonomi, pertolongan (dukungan sosial), dan interaksi sosial. Penelitian Bane dan Ellwood (1994); Coward et al. (1994); Scott dan Buttler (1997), yang menganalisis kombinasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif digunakan dalam penelitian ini sebagai konstruk yang lebih global dikaitkan dengan beragam dimensi lingkungan

yang melengkapi fasilitas dan pelayanan transportasi, perawatan kesehatan, perumahan, jasa kesehatan mental, jasa ekonomi, dan kesempatan untuk menjadi relawan. Digunakan beragam indikator kesehatan mental (seperti moral dan depresi) yang menilai kualitas pengalaman individu (*the inner-experience*), sedangkan kompetensi personal berkaitan dengan aspek kesehatan, status keuangan, dan lingkungan yang memberikan dukungan pribadi.

Menurut Whithaker dan Federico (1997), pengertian kesejahteraan sosial merupakan sistem suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang sejahtera. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sianipar, 1997).

Menurut Sumarti (1999), perbedaan status sosial budaya dan spesialisasi kerja akan menghasilkan persepsi kesejahteraan yang berbeda pula. Terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan ukuran kesejahteraan bersumber pada simbol kekuasaan budaya-politik, sementara monetisasi ekonomi menghantarkan kalangan masyarakat pada umumnya untuk lebih menggunakan ukuran kesejahteraan ekonomi dibandingkan ukuran

kesejahteraan sosial. Skoufias et al., (2000) menyatakan bahwa pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita, dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah, atau aset. Pada prinsipnya aspek yang dapat diamati dalam menganalisis kesejahteraan hampir sama, yaitu mencakup dimensi: pendapatan, pengeluaran untuk konsumsi, status pekerjaan, kondisi kesehatan, serta kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan kebutuhan dasar (seperti air, sanitasi, perawatan kesehatan dan pendidikan). Sedang menurut Rambe (2004), kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentrangan lahir batin yang memungkinkan setiap warganegara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Berdasarkan tingkat ketergantungan dari dimensi standar hidup (*standard of living*) masyarakat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dibedakan kedalam satu sistem kesejahteraan (*well-being*) dan dua subsistem, yakni: 1) subsistem sosial; dan 2) subsistem ekonomi, dengan beberapa faktor di antaranya kesejahteraan manusia, kesejahteraan sosial, konsumsi, tingkat kemiskinan, dan aktivitas ekonomi (World Bank: Santamarina et al., 2004).

Permasalahan Kesejahteraan sosial yang cenderung semakin kompleks, berskala luas dan menyebar merata di setiap wilayah, menuntut perhatian, kepedulian, kebijakan dan komitmen dari seluruh komponen dan elemen masyarakat bangsa. Bagaimana menemukenali akar permasalahannya, kemudian diberikan solusi dan ditangani secara komprehensif dan integratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 1999 Pemerintah Cq. Kementerian Sosial RI telah melakukan perubahan paradigma atau pola pikir pembangunan kesejahteraan sosial. Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial secara adil dan merata sesuai dengan hak-hak asasi manusia seperti amanat yang terkandung dalam pasal 27, ayat (2) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, pemerintah mengalami keterbatasan kemampuan pendanaan, maka paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada fungsi masyarakat dan berkurangnya peran pemerintah, yaitu memberikan peluang dan peranan bagi dunia usaha melalui “Corporate social responsibility” (tanggung jawab sosial dunia usaha yang menjadi kewajiban sepantasnya dilakukan karena merupakan kebutuhan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha berdasarkan prinsip saling menguntungkan/kemitraan). Tanggung jawab sosial dunia usaha dimaksud adalah tanggung jawab sosial yang tidak didasarkan pada tekanan dari masyarakat, pemerintah atau pihak lain melainkan berasal dari kehendak,

komitmen dan etika moral pengusaha sendiri yang tidak dipaksakan. (*Affirmative Corporate Social Responsibility*).

Paradigma baru pembangunan kesejahteraan sosial antara lain :

Pertama, dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan pendekatan pelayanan yang berlandaskan pembinaan dengan mengedepankan pada otoritatif pemerintah, menjadi pelayanan yang berlandaskan kemitraan dengan mengedepankan kemampuan dan peran aktif masyarakat.

Kedua, pelayanan yang berlandaskan mobilitas yang sifatnya instruktif-otoritatif operasional, kelembagaan bersifat top down dengan pendekatan birokrasi yang berdampak pada ketergantungan masyarakat dan menurunnya kesadaran masyarakat menjadi pelayanan yang berlandaskan partisipasi yang mengedepankan tanggung jawab sosial masyarakat, keberdayaan, kreatifitas masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur secara integratif-komprehensif.

Ketiga, pelayanan sentralistis menjadi pelayanan yang bersifat desentralistis yang mempertimbangkan keunikan daerah dan keragaman sosial budaya dengan mengedepankan potensi dan sumber daya komunitas lokal.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan fungsi pemerintah bersama masyarakat. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa setiap warga negara berhak atas taraf

kesejahteraan yang sebaik-baiknya dan berkewajiban sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yaitu bahwa: **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan **material, spiritual, dan sosial** yang memungkinkan setiap warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pada Pasal 3 menjelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki tujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Mengembalikan fungsi sosial untuk mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial .
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Masyarakat termasuk dunia usaha mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengindahkan garis-garis kebijaksanaan dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai daya guna dan hasil kerja yang

sebesar-besarnya, kalangan dunia usaha dapat membentuk lembaga sosial seperti yayasan, badan sosial, organisasi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Melalui lembaga tersebut, dunia usaha mempunyai wahana untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Perubahan atau pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang diikuti penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih mengedepankan peran aktif dan kemitraan kerja seluruh komponen masyarakat setempat untuk secara bersama bertanggung jawab dalam menjamin keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial, tidak terkecuali dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu program pembangunan dan atau pelayanan kesejahteraan sosial harus dilakukan secara terpadu yang melibatkan ketiga komponen (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha). Keterpaduan dalam pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial tersebut dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi dan karakteristik permasalahan lokal yang melingkupinya.

C. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Apri Kuntariningsih dalam Abstrak penelitiannya: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah disepakati oleh perusahaan-perusahaan swasta yang mengeksplorasi sumber daya alam untuk bisnis yang menguntungkan. Perusahaan diwajibkan untuk membayar kembali sebagian kecil dari laba

bersih kepada masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tanggung jawab sosial perusahaan dari perusahaan benih besar, yang disebut PT East West Seed Indonesia.

Penelitian menggunakan metode kualitatif, analisis deskriptif dan sosiologis. Temuan penelitiannya meliputi profil perusahaan, kegiatan CSR, penerima manfaat dari CSR, aspek sosiologi dari CSR dan dampak CSR. Singkatnya, perusahaan telah melakukan CSR secara komprehensif dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dalam hal aspek pendidikan, spiritual, sosial dan lingkungan. Penerima manfaat termasuk pekerja internal mitra petani, petani pengguna benih, konsumen dan anggota masyarakat lain di sekitar lokasi perusahaan.

Dari hasil penelitiannya Apri menyimpulkan bahwa EWINDO telah menjalankan tanggung jawab sosial korporasi-nya melalui program-program CSR yang dilakukannya terhadap keseluruhan *stakeholder* yang dimiliki EWINDO. Hal ini menunjukkan bahwa EWINDO telah dapat memetakan dengan baik mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang harus mendapatkan perhatian lebih agar semua pemangku kepentingan tersebut dapat bersinergi dalam rangka mendorong kemajuan perusahaan. EWINDO telah mencanangkan program CSR yang cukup tepat sasaran terhadap apa yang dibutuhkan para *stakeholdernya*, namun dalam pelaksanaannya kendala utama yang dihadapi terutama dalam program *income generating* dalam masyarakat adalah keberlanjutan program yang terhambat yang

dilatarbelakangi oleh ketergantungan masyarakat terhadap pendampingan dari pihak EWINDO.

Apri memberi rekomendasi bahwa Pemberdayaan perlu dilihat dalam dua hal, yakni keterampilan individual dan keterampilan organisasi (sosial dan manajemen). Kedua hal ini bukan sesuatu yang terpisah satu sama lain, tetapi saling mendukung satu sama lain. Karena itu dalam aspek pemberdayaan, kedua hal ini tidak boleh dipisahkan, dan harus memiliki keterkaitan satu sama lain. Pendekatan yang terlalu elitis perlu dikurangi dan diimbangi dengan pendekatan yang lebih populis. Pendekatan yang elitis dapat menimbulkan eksklusi sosial dalam masyarakat, dan menyebabkan pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui program *CSR* lebih sulit dilakukan.

Putu Edgar Tanaya dalam penelitiannya yang dimuat di jurnal mengabstraksikan bahwa Perseroan merupakan badan hukum layaknya manusia yang mempunyai organ serta saling mempengaruhi dan dipengaruhi pihak lain. Suatu perseroan tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemegang saham (*shareholder*), namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak – pihak yang terafiliasi dengan aktivitas perusahaan seperti karyawan, masyarakat, termasuk juga lingkungan sekitar tempat perseroan melakukan usahanya (*stakeholder*). Melalui pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR), perseroan bertanggung jawab memperhatikan kepentingan para *stakeholdernya* sehingga antara kegiatan mencari keuntungan (*profit oriented*) dan kegiatan sosial dapat berjalan secara

seimbang. Pelaksanaan CSR tentunya akan memberikan keuntungan baik materil maupun inmateril kepada *stakeholder*, namun pelaksanaan CSR juga memberikan keuntungan untuk perseroan. Melalui pelaksanaan CSR, kegiatan bisnis perseroan akan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*) karena mendapat dukungan dari para *stakeholder*. Berdasarkan hal tersebut CSR menjadi etika bisnis dan etika sosial perseroan dalam menjalankan usahanya.

Putu menyimpulkan bahwa sosiologi hukum pelaksanaan CSR sebagai etika bisnis dan etika sosial merupakan suatu tanggung jawab badan hukum mengingat badan hukum merupakan subyek hukum yang dalam kenyataan yuridis disejajarkan seperti manusia sebagai subyek hukum yang utama. sehingga konsekuensinya ketika manusia sebagai mahluk sosial memiliki banyak aspek eksternal yang harus diperhatikan yang dalam hal ini memperhatikan *stakeholder* termasuk lingkungan hidup melalui pelaksanaan CSR.

Setiap perlakuan yang dilakukan perusahaan terhadap aspek-aspek eksternal tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan badan hukum tersebut.

Penelitian Untung Basuki dkk berjudul : Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Industri terhadap sikap masyarakat atas keberadaan industri menyimpulkan bahwa secara umum industri telah melakukan tanggung jawab sosial atas eksploitasi bisnisnya, baik dalam bentuk dana maupun kegiatan yang dapat dipahami sebagai partisipasi dunia usaha dalam pembangunan sosial. Bentuk tanggung jawab sosial industri kepada masyarakat sekitarnya di kelompokkan

kedalam beberapa jenis secara bertingkat, yaitu : pengalokasian dana untuk kegiatan sosial yang bersifat insidental, penganggaran dana untuk kegiatan yang bersifat rutin, membentuk lembaga secara khusus untuk melaksanakan pengembangan masyarakat.

Wujud tanggung jawab sosial industri kepada masyarakat sekitar secara fisik adalah bantuan sarana dan prasarana sosial, rekrutmen tenaga dari masyarakat setempat, bantuan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, bantuan dana untuk peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan, dan bantuan massal untuk pengobatan, khitanan, dan layanan medis lainnya.

Penelitian ini merekomendasikan kepada : (1) Pemerintah: Menyusun kebijakan yang mengatur tanggung jawab sosial dunia usaha; melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah disusun; (2) Dunia Usaha : melakukan pengembangan masyarakat sebagai investasi sosial; (3) Masyarakat : masyarakat diharapkan tetap dapat mendukung kegiatan dunia usaha dan dapat merawat fasilitas yang ada disekitar industri.

Hasil-hasil penelitian lain yang lokusnya sama pada PT Vale antara lain : Penelitian yang dilakukan Sawedi Muhammad, dkk dengan judul :” Mitigasi Konflik di Lingkar Tambang: Studi Tentang Kontribusi Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. Vale Indonesia di Sorowako”. Kesimpulan penelitiannya adalah bahwa Pelaksanaan CSR PTVI telah mengikuti kaidah-kaidah yang memenuhi prinsip transparansi dan keterbukaan. Manajemen CSR PTVI sangat relevan dengan konsepsi Visser (2010), yaitu CSR yang transformatif. Pada tahapan ini keseluruhan aktifitas CSR difokuskan untuk

mengidentifikasi dan menanggulangi akar masalah dari persoalan yang selama ini dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkelanjutan. Sistem CSR PTVI secara terus menerus mengalami transformasi secara menyeluruh dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait. Kerangka pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, telah menghasilkan perencanaan program 5 tahunan yang tertata dengan baik. Sistem monitoring dan evaluasi serta sanksi yang jelas bagi mereka yang melakukan pelanggaran juga sangat tegas diatur dalam buku panduan yang telah disosialisasikan ke segenap pemangku kepentingan.

Berdasarkan kondisi objektif tersebut, CSR PTVI telah memasuki tahapan filantropis sebagaimana yang ditegaskan oleh Carroll (1991). Evolusi pelaksanaan CSR PTVI perlahan merangkak dari tahapan mencapai target ekonomi (profit) kemudian patuh dan taat terhadap kewajiban-kewajiban hukum (*compliance*) dan terus bergerak melampaui aspek-aspek etika dalam berbisnis. Pada akhirnya, CSR PTVI mencapai tahapan filantropis-transformatif yang menurut Carroll (1991) dan juga Visser (2010) merupakan tahapan tertinggi dari implementasi CSR yang berkelanjutan. Model CSR seperti ini juga sejalan dengan konsepsi integratif dari Preston dan Post (1975) dimana perusahaan secara serius mengintegrasikan tuntutan sosial masyarakat dengan program-program pemberdayaan yang dilakukannya. Dengan demikian maka terciptalah pola interaksi dan komunikasi yang saling memahami dalam kerangka fungsional berkelanjutan sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsons (1961). PTVI berhasil beradaptasi dengan

lingkungan sekitarnya melalui integrasi sosial-kultural dengan nilai-nilai dan filosofi perusahaan.

Penelitian Fitri Hillary Michiko yang berjudul :” Tinjauan Hukum *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Indonesia (Studi Kasus Pemberian Dana CSR melalui Hibah), memberikan saran yang belajar dari kasus penyalahgunaan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah atas dana hibah dari PT. Vale Indonesia bahwa ada baiknya pemerintah Indonesia segera membuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan terstruktur mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) ini. TJSL diatur diberbagai peraturan terkait namun penulis melihat begitu banyak celah hukum dan ketidakjelasan dalam sedikit pasal mengenai TJSL tersebut diberbagai peraturan perundang-undangan terkait. Bahwa TJSL harus memiliki pengaturan jelas mengingat bahwa kedudukan menjalankan TJSL adalah kewajiban bagi perseroan terbatas dan juga mengingat asas kemanfaatan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, asas keadilan, serta kepastian hukum.

Penelitian Jamaluddin dan Suhardi M. Anwar yang berjudul :” Pengaruh CSR PT Vale Indonesia Tbk Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kecamatan Nuha, dalam abstraknya mengemukakan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate social responsibility (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Nuha. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang diperoleh disini merupakan keseluruhan bahan, keterangan, data, fakta-

fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara eksak matematis, tetapi hanya berwujud keterangan naratif semata. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan tiga model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR PT Vale Indonesia Tbk berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan kelompok tani di Kecamatan Nuha, tapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Model 1 kontribusi dana CSR pada bidang pendidikan sebesar 71,6 dan model 2 memberikan kontribusi dana CSR pada bidang pertanian di kecamatan Nuha sebesar 93.7%. Sedangkan model 3 menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diproyeksikan dengan tingkat kesehatan.

Rasdiah Rasyid (Dosen Kopertis Wil IX Sulawesi DPK Universitas Patria Artha Makassar) dalam penelitiannya yang berjudul :” Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Pada PT. Vale Indonesia Tbk:, menyatakan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada PT Vale Indonesia. Penelitian ini diterapkan di lingkungan PT Vale Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode data yang digunakan adalah wawancara langsung kepada banyak pihak yang terlibat dalam permasalahan yang sedang dibahas dan memberikan kuesioner kepada karyawan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji T, uji F dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil analisis menunjukkan bahwa

Penerapan Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada PT Vale Indonesia.

Penelitian Hady Rangga Loleh yang berjudul :” Relasi Negara, Bisnis, dan Masyarakat (Implementasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale Indonesia Tbk Di Desa Malili Kab. Luwu Timur)”, Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: Analisis implementasi kerja-sama Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk dalam kerangka relasi negara dan bisnis dan respon masyarakat petani terhadap Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. Dengan obyek lokasi di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kerja-sama program PTPM antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, serta respon masyarakat petani terhadap program PTPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, metode pengumpulan data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan, bukubuku, jurnal, hasil penelitian, internet dan laporan yang tersusun dalam arsip, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan empat teori yaitu Negara dan Pasar, Teori Negara Pembangunan, Kesejahteraan

Masyarakat, dan Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis implementasi kerja-sama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat seperti memberikan bantuan pelatihan-pelatihan khusus kepada masyarakat petani, serta bantuan pupuk, traktor dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. dan relasi negara dan bisnis dalam hal ini pemerintah dan Perusahaan PT. Vale sama-sama saling menguntungkan dimana PT. Vale mendukung program-program pemerintah dan PT. Vale membutuhkan pemerintah untuk legitimasi dalam melakukan aktivitas penambangan.

Adapun respon masyarakat petani terhadap program PTPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur, ada respon positif dan ada juga respon negatif, dalam respon positif masyarakat diberikan bantuan berupa pelatihan-pelatihan khusus kepada para petani dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan. dan adapun respon masyarakat negatif dikarenakan masih ada sebagian masyarakat petani yang belum puas terhadap kebijakan Pemerintah dan PT. Vale karena kebijakan tersebut dinilai hanya membuang waktu dan anggaran dalam melakukan pelatihan-pelatihan yang kurang diminati dari sebagian masyarakat. PTPM yang merupakan Program CSR PT. Vale belum bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Luwu Timur akan tetapi Program PTPM tersebut memberikan banyak kemajuan dan dampak positif bagi masyarakat di wilayah Luwu Timur.

(Sumber: <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1264/1/Hady%20Rangga%20Loleh.pdf>)

Penelitian Ikhsan Jafar yang berjudul :”Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan dianalisa dengan menggunakan kegiatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek layanan sosial terjadi perubahan orientasi program pada tahun 2013-2017 menitikberatkan pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Ketiga bidang tersebut dilaksanakan dengan berbagai program yang kongkrit dirasakan oleh masyarakat namun pada tahun 2018 terjadi perubahan orientasi dimana program CSR mengikuti program pemerintah melalui pembagian kawasan. Pada aspek Peningkatan Profit / Usaha Masyarakat menunjukkan bahwa pemberian keterampilan kepada masyarakat dilakukan dengan melibatkan lembaga karang taruna. Terdapat kegiatan budidaya tanaman herbal dengan pemberian bibit

tanaman herbal yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat yang telah membudidayakannya.

Pada aspek perbaikan lingkungan menunjukkan bahwa adanya kepedulian terhadap isu lingkungan salah satu caranya adalah memberikan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB) dan pada tahun 2018 yang berorientasi pada kawasan sehingga pengelolaan lingkungan didasarkan pada kebutuhan kawasan seperti pembangunan apartemen ikan pada kawasan pesisir. Pada aspek upaya memperkecil konflik menunjukkan bahwa upaya untuk menekan konflik dilakukan dengan inisiatif yang cukup cepat hal ini dapat dilihat dari pembentukan tim khusus yang bertugas untuk meninjau lokasi dan melakukan pengosongan lahan sehingga proses selanjutnya adalah penyerahan lahan dari PT. Vale kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk diserahkan kepada masyarakat. Pada aspek kegiatan budaya masyarakat menunjukkan terdapat upaya yang dilakukan PT Vale dalam mengadopsi kearifan lokal atau budaya setempat seperti pada desain TRWS yang menyerupai daun Welanreng hal ini menampilkan ikon lokal dan juga meluncurkan dua buku Cerita Rakyat yang memiliki pesan moral dan nilai budaya lokal. (Sumber : https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/8837-Full_Text.pdf)

Iskandar Siregar dalam peneitian disertasi yang berjudul :”Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Citra Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur” (dibimbing oleh A. Karim Saleh, Abd. Hamid Paddu dan Sanusi Fattah) Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis pengaruh implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Tbk terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh tidak langsung implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Tbk terhadap citra perusahaan melalui pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan teknik studi dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis *structural equation modeling* (SEM) serta uji validitas dan reliabilitas data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CSR PT Vale Indonesia Tbk, terdiri atas: pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR PT Vale Indonesia Tbk juga berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap citra perusahaan melalui pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

(Sumber:http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/OT_hhYWJmNmZlODAzMzQ1NDg5OWU1ZWNIbWVjNDA5ZDVlMDdlMWI1NQ==.pdf)

Tabel 2. 5. Penelitian terdahulu

| No | Penulis/Judul | Rumusan Masalah | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1. | <p>Iskandar Siregar dalam penelitian disertasi yang berjudul :”Implementasi Corporate Social Responsibility Terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Dan Citra Perusahaan PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur”</p> | <p>1.Apakah Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) oleh PT Vale Indonesia Tbk yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat ?</p> <p>2.Apakah pemberdayaan masyarakat berpengaruh langsung terhadap citra perusahaan?</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah :</p> <p>1. Penelitian ini Ingin mengetahui Apakah Implementasi CSR PT. Vale berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat?. Lalu Apakah Pemberdayaan dan Kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap Citra Perusahaan PT.</p> |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | 3. Apakah kesejahteraan masyarakat berpengaruh langsung terhadap citra perusahaan? | Vale?. 2. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kuantitatif. |
| 2. | Syansu A. Kamaruddin dalam penelitian Disertasinya yang berjudul :”Industrialisasi dan Perubahan Sosial, Studi Dampak Sosial Industri PT. Semen Tonasa terhadap masyarakat sekitar”. | 1. Bagaimana proses terjadinya pergeseran stratifikasi social, status dan peran serta nilai dan sikap akibat industrialisasi pada masyarakat sekitar Pabrik Semen Tonasa?. 2. Bagaimana proses terjadinya perubahan ekosistem dan dampak social yang dialami masyarakat sekitar akibat industrialisasi. | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah : 1. Penelitian ini Ingin menguraikan proses terjadinya pergeseran stratifikasi social, status dan peran serta nilai dan sikap akibat industrialisasi pada masyarakat sekitar Pabrik Semen Tonasa?. Serta Bagaimana proses terjadinya perubahan ekosistem dan |

| | | | |
|----|------------------------------------|---|--|
| | | | <p>dampak social yang dialami masyarakat sekitar akibat industrialisasi.</p> <p>2. Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif – kualitatif dengan Pendekatan Survei.</p> |
| 3. | Jamaluddin dan Suhardi M. Anwar | <p>1. Bagaimana pengaruh <i>corporate social resonsibility</i> (CSR) terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Nuha.</p> <p>2. Bagaimana kontribusi dana CSR pada bidang pendidikan, pada bidang pertanian dan kesejahteraan.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah :</p> <p>1. Penelitian ini ingin melihat pengaruh CSR PT Vale pada bidang pendidikan, pertanian dan kesejahteraan.</p> <p>2. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan tiga model.</p> |
| 4. | Hady Rangga Loleh | 1. Bagaimana implementasi | Perbedaan penelitian |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>dalam penelitiannya yang berjudul : Relasi Negara, Bisnis, Dan Masyarakat (Implementasi Program Terpadu Pengembangan Masyarakat PT. Vale Indonesia Tbk Di Desa Malili Kab. Luwu Timur)</p> | <p>kerja-sama program PTPM antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk.</p> <p>2. Bagaimana respon masyarakat petani terhadap program PTPM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur</p> | <p>ini dengan penelitian penulis adalah :</p> <p>1. Penelitian ini mengkaji tentang relasi negara dan bisnis dalam CSR PT. Vale Indonesia Tbk, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>2. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal yaitu: Analisis implementasi kerja-sama dan respon masyarakat petani terhadap program terpadu pengembangan masyarakat (PTPM) dalam meningkatkan</p> |
|--|---|---|--|

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | kesejahteraan masyarakat di Desa Malili Kabupaten Luwu Timur. |
| 5. | Ikhsan Jafar dalam penelitiannya berjudul :” Implementasi CSR terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. | 1. Bagaimana Implementasi CSR Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada aspek yang diteliti : 1. Aspek layanan social pada tiga bidang yaitu pendidikan, kesehatan, dan perekonomian 2. Aspek Peningkatan Profit /Usaha Masyarakat. 3.Aspek perbaikan lingkungan. 4.Aspek upaya memperkecil konflik. 5.Aspek kegiatan budaya. |

B. Kerangka Pemikiran

